



**KOLABORASI PEMERINTAH DESA DENGAN KOMUNITAS WISATA  
DALAM PENGELOLAAN DESTINASI WISATA PANTAI PAYANGAN  
DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh :

Dhana Febrian Safitri  
NIM. 140910201027

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**KOLABORASI PEMERINTAH DESA DENGAN KOMUNITAS WISATA  
DALAM PENGELOLAAN DESTINASI WISATA PANTAI PAYANGAN  
DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Administrasi Negara dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh :

Dhana Febrian Safitri  
NIM. 140910201027

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua terbaik di dunia ayahanda Sudarsono dan ibunda Yulistiani yang telah membesarkan dan mengasuh saya dengan penuh kasih sayang, atas segala do'a serta dukungannya yang luar biasa serta nasihat dan jerih payah yang dilakukan semata-mata hanya demi kebahagiaan dan masa depan saya, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak dan dengan ridhoNya ijinkan saya untuk membalasnya.
2. Adik kandung saya Rafif Zaidan Al-Azmi yang telah menemani, meluangkan waktu dan tenaga untuk bantuan-bantuan kecil dalam penyusunan tugas akhir ini serta do'a dan segala motivasi yang sangat berharga sehingga mengingatkan saya atas segala tanggung jawab saya yang belum terselesaikan.
3. Guru-guruku yang tulus dan ikhlas mendidik, memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat luar biasa hingga jasa-jasanya tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup.
4. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

“Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”

(Qs Al Insyirah: 8)

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(Qs Al Insyirah: 5-6)

*“A strong woman is someone who thinks for herself, stays true to her principles, and lives by her rules”*

(Maudy Ayunda dalam *Dear Tomorrow*)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhana Febrian Safitri

NIM : 140910201027

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Komunitas Wisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Juli 2018

Yang menyatakan,

Dhana Febrian Safitri

NIM 140910201027

**HALAMAN PERBIMBINGAN**

**SKRIPSI**

Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan Komunitas Wisata Dalam Pengelolaan  
Wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten  
Jember

Oleh

Dhana Febrian Safitri

140910201027

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sutomo, M.Si



**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Komunitas Wisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari dan tanggal : Rabu, 18 Juli 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua

Drs. Anwar, M.Si

NIP 196306061988021001

Pembimbing Utama

Drs. A Kholiq Azhari, M.Si

NIP 195607261989021001

Pembimbing Anggota

Dr. Sutomo, M.Si

NIP 196503211991031003

Penguji Anggota

Abul Haris Suryo Negoro, S.IP, M.Si

NIP 198210292015041001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Komunitas Wisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**; Dhana febrina Safitri, 140910201027; 2018: 90 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi Pemerintah Desa dan Komunitas Wisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pengelolaan pariwisata pada suatu daerah atau desa merupakan bentuk pengelolaan potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Untuk mencapai suatu pengelolaan yang baik perlu diadakannya suatu kolaborasi dengan beberapa tahapan sebagai berikut: *Assesment, Initiation, Deliberation, Implementation*. Salah satu desa di Kabupaten Jember yang mengelola potensi desanya melalui sektor pariwisata ialah Desa Sumberejo. Pantai Payangan merupakan ikon terbaik di Desa Sumberejo, Pantai Payangan murni dikelola oleh masyarakat melalui kerja sama *stakeholder* yang diantaranya ialah: Pemerintah Desa Sumberejo, kelompok sadar wisata dan masyarakat sekitar destinasi. Kurangnya koordinasi dan komunikasi serta pembagian tugas antar *stakeholder* menjadikan *stakeholder* hanya fokus pada bidangnya masing-masing sehingga penting untuk diadakan suatu kolaborasi. Namun dengan kondisi tersebut, upaya pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan tetap berjalan dan menghasilkan perubahan baik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan tiga teknik pengambilan data yaitu: wawancara. Dokumentasi dan



observasi, penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder. Jumlah keseluruhan informan yaitu 7 orang yaitu Kepala Desa Sumberejo, Kepala Dusun Payangan, Sekretaris Desa, Suparto dan Suyitno selaku ketua kelompok nelayan, Suto Wijoyo selaku ketua kelompok sadar wisata dan Tri Budi Setiawan selaku anggota kelompok sadar wisata. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik penyajian dan analisis data.

Berdasarkan analisis data untuk mengetahui kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kabupaten Jember dapat dilakukan melalui 4 tahapan. Tahap pertama *assesment* dimulai dengan penilaian, penilaian dalam rangka mengidentifikasi apakah kolaborasi dibutuhkan atau tidak. Kemudian tahap inisiasi, kegiatan ini mencakup kegiatan rapat dan membangun kelompok kerja. Selanjutnya adalah tahap deliberasi atau musyawarah, tahapan ini mencakup kegiatan membangun aturan dasar. Tahap terakhir merupakan tahap implementasi yang menentukan apakah kolaborasi itu dapat terus dilangsungkan atau justru sebaliknya.

Pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo kabupaten Jember tergolong baik. Meskipun kurangnya koordinasi dan pembagian tugas antar *stakeholder* dalam pengelolaannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan yang mengunjungi Pantai Payangan serta dikenalnya Pantai Payangan oleh masyarakat luas sehingga menjadikan pengelolaan ini memberikan perubahan baik hingga sekarang.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Komunitas Wisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Kepala Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, serta selaku Dosen Pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan saran mengenai akademik selama saya menjadi mahasiswa baru sampai lulus sekarang ini;
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara
8. Kedua orang tuaku ayahanda Sudarsono dan ibunda Yulistiani, adik saya Rafif Zaidan Al-Azmi serta nenek tercinta dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi, sehingga penulis bisa lebih semangat dalam berusaha untuk mencapai cita-cita;
9. Seluruh narasumber, Kepala Desa Sumberejo Bapak Riyono Hadi, Bapak

Ngadi selaku Kepala Dusun Payangan, Bapak Suparto dan Suyitno selaku ketua kelompok nelayan Desa Sumberejo, Bapak Suto Wijoyo selaku ketua kelompok sadar wisata, Bapak Tri Budi Setiawan selaku anggota kelompok sadar wisata serta bapak Dedi Winarno selaku pengembangan produk wisata Kabupaten Jember, terima kasih telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktu dalam hal penelitian ini serta telah memberikan data dan informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh penulis;

10. Handoko Wicaksono selaku calon suami penulis yang Insyaallah atas izinNya semoga kita segera dipersatukan, terima kasih telah meluangkan tenaga, waktu dan doanya, serta telah memberikan semangat yang tiada henti-hentinya untuk menyelesaikan penelitian ini;
11. Sahabatku Rizma Maghfirotul Azizah, Febri Subachtiar, Yogi Haqiqi Fanani, Andita Purnama Sari, Oktavia Nabilah dan Imelda Oktaviana serta seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Negara 2014, terima kasih atas kebersamaan selama masa kuliah;
12. Temanku Maysaroh dan sepupuku Swastika Prawita Sari yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan saran yang membangun agar Tugas Akhir ini dapat terselesaikan;
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga segala budi baik yang telah diberikan mendapat balasan yang luar biasa berkahnya dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memberikan usaha terbaiknya secara maksimal, namun skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 3 Juli 2018

Yang menyatakan

Dhana Febrian Safitri  
NIM 140910201027

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERBIMBINGAN .....	v
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA .....	ix
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Bagi Dunia Akademis.....	11
1.4.2 Bagi Pemerintah .....	11
1.4.3 Bagi Masyarakat luas.....	11
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Konsep Dasar .....	12
2.2 <i>Governance</i> .....	12
2.3 <i>Stakeholder</i> .....	14
2.3.1 Pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ) Pengelolaan Destinasi Wisata .....	16

2.4 Kolaborasi .....	18
2.4.1 Bentuk-bentuk Perjanjian Kerja Sama.....	22
2.5 Pengelolaan Destinasi Pariwisata .....	24
2.5.1 Pengertian Pengelolaan.....	24
2.5.2 Pengertian Destinasi .....	25
2.5.3 Pengertian Pariwisata.....	26
2.6 Pemerintah Desa.....	28
2.6.1 Pengertian Pemerintah Desa .....	29
2.6.2 Kewenangan Desa .....	29
2.6.3 Wilayah Kewenangan .....	31
2.7 Komunitas Wisata .....	31
2.7.1 Pengertian Komunitas.....	31
2.7.2 Pengertian Wisata.....	32
2.8 Kerangka Berpikir .....	32
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Fokus Penelitian .....	35
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	36
3.4 Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Penentuan Informan.....	39
3.7 Metode Analisis Data .....	40
3.8 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	41
<b>BAB 4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	42
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember.....	42



4.1.2 Gambaran Umum Desa Sumberejo .....	43
4.1.3 Gambaran Umum Pantai Payangan .....	46
4.2 Hasil Penelitian .....	47
4.2.1 Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan.....	47
4.2.2 Tahap Identifikasi ( <i>Assesment</i> ) .....	47
4.2.3 Tahap Inisiasi ( <i>Initiation</i> ) .....	51
4.2.4 Deliberasi ( <i>Deliberation</i> ) .....	56
4.2.5 Tahap Implementasi ( <i>Implementation</i> ).....	63
4.3 Kendala Kolaborasi Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan .....	76
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	79
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Ranking Devisa Pariwisata terhadap Komoditas Ekspor Lainnya.....	1
Tabel 2.1 Tahapan Pelaksanaan Collaborative Governance oleh Morse dan Stephens.....	20
Tabel 4.1 Tahapan Identifikasi Kolaborasi Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan dikaji menggunakan Tahapan <i>Assesment Collaborative Governance</i> .....	51
Tabel 4.2 Tahapan Inisiasi Kolaborasi Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan dikaji menggunakan Tahapan <i>Initiation Collaborative Governance</i> .....	56
Tabel 4.3 Pembagian Tugas Kelompok Kerja Sama Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan.....	58
Tabel 4.4 Tahapan Deliberasi Kolaborasi Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan dikaji menggunakan tahapan <i>Deliberation Collaborative Governance</i> .....	62
Tabel 4.5 Hasil dan Bukti Kerja Sama <i>Stakeholders</i> .....	67
Tabel 4.6 Struktur Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Kelompok Sadar Wisata Desa Sumberejo.....	68
Tabel 4.7 Tahapan Implementasi Kolaborasi Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan dikaji menggunakan tahapan <i>Implementation Collaborative Governance</i> .....	75

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Jumlah Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Jember.....4

Gambar 4.1 Peta Desa Sumberejo.....45



**DAFTAR LAMPIRAN**

A. Pedoman Wawancara.....	84
B. Foto-foto Penelitian.....	91
C. Akta Notaris dan PPAT Kelompok Sadar Wisata Desa Sumberejo.....	93
D. Riwayat Singkat Masyarakat Sadar Wisata Desa Sumberejo.....	104
E. Undangan Rapat dan Musyawarah Kegiatan Pariwisata Pantai Payangan.....	105
F. Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.....	106
G. Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol.....	107

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang jumlahnya terdiri dari 17.000 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah daratannya 1.922.570 km<sup>2</sup> serta memiliki luas wilayah perairannya 3.257.483 km<sup>2</sup> (wikipedia.com). Kondisi geografis tersebut sebagai perwujudan tentang keaneka ragaman hayati, keindahan alam, ekosistem, ekowisata, ekosistem hutan trofika, ekosistem perairan khususnya ekosistem perairan laut, atraksi wisata alam yang dapat dikembangkan untuk obyek wisata alam. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan darat maupun laut yang sangat melimpah. Kekayaan tersebut meliputi kekayaan tambang dan mineral, perkebunan, kekayaan kelautan dan perikanan, pertanian sekaligus pariwisata yang berbasis alam. Sumber kekayaan tersebut harus dikelola dan dikembangkan secara optimal sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan bagi setiap daerah yang mampu mengelola sumber kekayaan tersebut. Selain itu sumber kekayaan tersebut juga dapat mendatangkan devisa bagi negara. Pariwisata adalah penyumbang devisa negara terbesar kedua. Berikut merupakan tabel sumber-sumber devisa negara Tahun 2016 :

Tabel 1.1 Ranking Devisa Pariwisata Terhadap Komoditas Ekspor Lainnya

No	Komoditas	Devisa (Juta USD)
1	CPO (Minyak dan kelapa sawit)	15,965
2	Pariwisata	13,568
3	Migas	13,105
4	Batu Bara	12,898
5	Pakaian jadi	6,229

Sumber: [www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=117&id=1198](http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=117&id=1198) (2017)

Menurut MacIntosh (1980:8) dalam I Gde dan Ketut (2009:45) pariwisata adalah rangkaian fenomena dan hubungan muncul dari interaksi para turis atau pelancong, bisnis, pemerintah setempat, dan komunitas setempat dalam proses

menarik dan menyambut turis-turis dan pengunjung lainnya. Pembangunan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. Pengelolaan potensi pariwisata merupakan upaya memanfaatkan hingga mendayagunakan potensi pariwisata untuk kepentingan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut I Gde dan Ketut (2009:86) tujuan dari pengelolaan pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya.

Salah Wahab (1996:103) berpendapat bahwa pada negara berkembang seperti Indonesia memiliki potensi pariwisata yang baik, pariwisata dapat dijadikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan likuiditas keuangan negara dalam waktu yang lebih singkat daripada sektor produksi lain seperti pertanian dan industri. Pariwisata merupakan sebuah industri yang kompleks, sektor ini dapat berfungsi sebagai katup pengaman atas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang makin serius di masa-masa mendatang. Di samping itu, perkembangan sektor pariwisata selain sebagai penghasil devisa negara juga memberikan keuntungan kepada daerah serta masyarakat yang tinggal di daerah wisata. Melalui pengelolaan pariwisata dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah maupun negara.

Pengelolaan pariwisata yang baik suatu negara dapat mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara dalam jumlah besar. Pemanfaatan sumber-sumber kekayaan darat dan laut di Indonesia ke arah pengembangan pariwisata merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang sangat menjanjikan. Hal ini karena kegiatan wisata merupakan salah satu kebutuhan setiap individu yang pada masa sekarang ini telah menjadi kebutuhan yang cukup penting bagi hampir setiap orang sebagai bentuk pelepasan kepenatan rutinitas kerja yang semakin meningkat. Oleh karena itu, banyak daerah-daerah di Indonesia yang mengelola dengan membenahi dan mengembangkan destinasi pariwisata yang dimiliki agar menarik wisatawan baik nusantara maupun

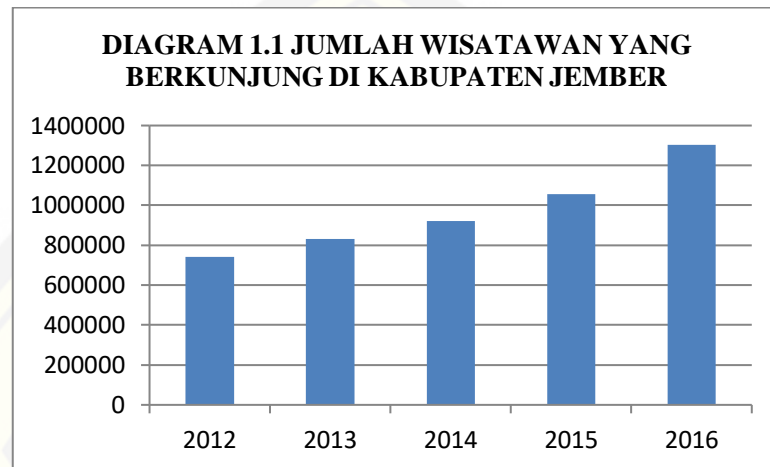


mancanegara untuk berkunjung ke destinasi pariwisatanya. Pengelolaan destinasi pariwisata tidak lagi hanya dipandang sebelah mata dalam pembangunan suatu daerah, tetapi sekarang ini telah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah maupun negara yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian negara, daerah dan masyarakat secara luas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan bagi Pemerintah Daerah, hal ini menjadikan Pemerintah Daerah mempunyai pilihan dan wewenang dalam mengatur dan mengelola pariwisata di daerahnya. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan mengelola potensi di masing-masing daerah, tentu dengan mengacu pada pedoman dan kebijakan ditingkat yang lebih tinggi agar sesuai dengan konsep pariwisata nasional.

Salah satu Kabupaten di Indonesia yang memprioritaskan sektor pariwisata sebagai pembangunan di daerahnya adalah Kabupaten Jember. Dimana Kabupaten Jember mempunyai banyak aset wisata alam yang dapat dijadikan sarana pariwisata di Jember. Pariwisata di Kabupaten Jember mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adanya peningkatan sektor pariwisata yang terus menerus di Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya menaikkan angka wisatawan pada tahun-tahun berikutnya untuk dapat berkunjung di Kabupaten Jember, usaha Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya ialah dengan melakukan pengelolaan disetiap Kecamatan dan Desa yang memiliki potensi kepariwisataan.





Sumber: Buku panduan pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2017

Salah satu Desa di Kabupaten Jember yang mengelola dan mengembangkan pariwisata di daerahnya adalah Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu. Desa ini berjarak kurang lebih 40 km dari pusat Kota Jember. Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember mempunyai kekayaan alam yang menarik untuk dapat dikembangkan guna mengenalkan Desa Sumberejo di ranah nasional bahkan Internasional. Selain itu melalui peningkatan pengelolaan pariwisata di Desa Sumberejo dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa setempat. Salah satu potensi alam yang dimiliki Desa Sumberejo yaitu Wisata Pantai Payangan.

Pantai Payangan merupakan pantai yang terletak di Dusun Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Pantai Payangan ini memiliki pesona empat bukit yaitu bukit Samboja, bukit Seroyo, bukit Sarat dan bukit Seruni. Dari atas bukit Seroyo wisatawan dapat melihat keindahan teluk *love* dan bukit Samboja yang menyajikan keindahan luasnya laut selatan. Bukan hanya itu, di atas bukit Samboja terdapat makam raja dan ratu dari Ponorogo yang dijadikan sebagai wisata religi, serta terdapat peninggalan goa jepang. Selain itu, di sekitar Pantai Payangan juga terdapat pasar ikan yang menyediakan berbagai macam jenis ikan dan kerang untuk diolah sebagai masakan. Bersama dengan Pantai

Papuma dan Pantai Watu ulu, Pantai Payangan menjadi salah satu tujuan wisata pantai favorit yang memiliki pasir berwarna kecoklatan di Jember.

Wisata Pantai Payangan sudah dikenal oleh masyarakat Jember dan sekitarnya. Bahwasanya Pantai Payangan terbilang belum jelas status kepemilikannya, menurut Kepala Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Sandi Suwardi Hasan menjelaskan setelah dilakukan pelacakann ternyata status lokasi itu belum jelas kepemilikannya apakah milik perorangan, Pemerintah Daerah atau instansi lainnya. Sehingga saat ini wisata Pantai Payangan mulai banyak diminati meski belum jelas pengelolaannya. Pengelolaan wisata alam di Desa Sumberejo perlu ditingkatkan, dukungan dari pemerintah sangatlah penting untuk dapat mengembangkan potensi alam yang dimiliki Desa Sumberejo diantaranya dengan mengadakan peningkatan pembangunan diberbagai sektor guna menumbuhkan daya tarik wisatawan pada Pantai Payangan.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manager*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus sesuatu untuk mencapai tujuan. Menurut Prajudi dalam Adisasmita (2011:21) pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Pengelolaan penting untuk diteliti, dengan pengelolaan maka seluruh kegiatan yang dilakukan menjadi jelas dan terarah. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam mengelola obyek wisata Pantai Payangan menjadi jelas siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian pencapaian sasaran pengelolaan destinasi wisata menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan demikian penting dalam usaha mewujudkan obyek wisata yang memiliki daya tarik serta menarik bagi wisatawan. Pengelolaan wisata Pantai Payangan yang baik bukan saja menarik wisatawan, lebih dari itu dapat menyerap banyak tenaga kerja dan membuka

kesempatan berusaha. Di samping itu pengelolaan wisata Pantai Payangan yang baik dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Masyarakat Desa Sumberejo mendukung upaya pembangunan desa untuk dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata dikarenakan perekonomian masyarakat Sumberejo masih sangat lemah. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sumberejo perlu meningkatkan pengelolaan objek wisata alam Pantai Payangan diantaranya dalam menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban beserta keindahannya secara optimal.

Pemerintah Desa Sumberejo mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan Pantai Payangan dengan pengadaan pembangunan dan pengembangan di berbagai sektor untuk dapat menghadirkan wisatawan dalam jumlah banyak, dengan demikian akan berpengaruh langsung terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Sumberejo. Dengan mengelola wisata alam Pantai Payangan secara optimal akan memberikan peluang bagi pembangunan desa melalui perbaikan sarana dan prasarana, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintahan Desa sangat penting dalam penyelenggaraannya. Pemerintah Desa tidak bisa berjalan sendiri dalam mengelola wisata Pantai Payangan, masyarakat yang meliputi komunitas wisata juga turut serta di dalamnya, hal ini bertujuan untuk pengelolaan sektor pariwisata di Desa Sumberejo yang lebih baik.

Dalam mengelola wisata alam yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Pemerintah Desa Sumberejo membutuhkan partisipasi dan kerja sama dengan masyarakat sekitar serta komunitas wisata yang ada di Desa Sumberejo. Hal ini berkaitan dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2017 yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief menjelaskan bahwa pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di Kabupaten Jember akan dilaksanakan pada tahun 2017 yang merupakan bagian dari kawasan prioritas pariwisata dan pokdarwis tersebut berada di sekitar destinasi wisata ([antara.jatim.com](http://antara.jatim.com)).

Desa Sumberejo adalah salah satu desa di Kabupaten Jember yang menjadi sasaran pembentukan Pokdarwis. Pokdarwis Desa Sumberejo berasal dari kalangan masyarakat (*civil society*) yang mempunyai peranan penting dalam pengelolaan wisata alam Pantai Payangan. Pokdarwis di Desa Sumberejo juga bekerja sama dengan komunitas lainnya yang meliputi komunitas kuliner dan komunitas nelayan. Komunitas kuliner yang bertanggung jawab mengelola dan menyediakan makanan serta minuman di area sekitar Pantai Payangan, sedangkan komunitas nelayan yang menyediakan berbagai macam jenis ikan hasil tangkapan yang akan diperdagangkan di pasar Desa Sumberejo serta pengadaan festival dan tradisi setiap tahun untuk menumbuhkan daya tarik pengunjung pada Pantai Payangan. Dalam segi keamanan, masyarakat sekitar yang menyediakan lahan parkir untuk penitipan alat transportasi para wisatawan yang berkunjung.

Belum jelasnya hak kepemilikan dan pengelolaan serta kurangnya koordinasi antar komunitas dan *stakeholder* sehingga menjadikan komunitas-komunitas yang ada di Pantai Payangan kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut mengharuskan Pemerintah Desa Sumberejo untuk melakukan kolaborasi dengan komunitas wisata Desa Sumberejo untuk mengelola dan mengembangkan wisata alam Pantai Payangan. Kolaborasi inilah diharapkan dapat mengembangkan destinasi wisata Pantai Payangan. Kerjasama untuk mengelola potensi pariwisata Pantai Payangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberejo beserta keterlibatan masyarakatnya merupakan peluang untuk



meningkatkan pembangunan desa yang akan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

Secara umum, kolaborasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama antar individu, individu dengan organisasi atau antar organisasi dalam rangka menyelesaikan masalah bersama atau mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai kooperasi dalam rangka menyelesaikan konflik, dengan cara mengelola konflik yang ada dalam organisasi sampai menemukan kata sepakat. Kolaborasi merupakan strategi pelaksanaan *governance* dalam pengambilan dan implementasi kebijakan yang mengutamakan konsensus dari *multiple stakeholder* yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Artinya dalam mengelola obyek wisata alam, Pemerintah Daerah melibatkan kedua domain *good governance* yaitu sektor swasta (*market*) dan masyarakat sipil.

Kolaborasi pengelolaan destinasi pariwisata Pantai Payangan merupakan salah satu wujud konsep *governance*, dimana terdapat dua pilar utama *governance* yaitu Pemerintah dan masyarakat (*civil society*) yang berkolaborasi dalam melakukan upaya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Morse dan Stephens (2012:566) berpendapat bahwa “*collaborative is added as a modifier to governance to emphasize the nature of the process by which the various societal actors engage in collective action*”, berarti kolaborasi merupakan nilai sebagai suatu bentuk modifikasi pelaksanaan *governance* yang menekankan kealamian proses kesepakatan dari berbagai aktor sosial (*stakeholder*) yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat maupun lembaga non-pemerintah dalam tindakan kolektif atau kerjasama. Morse dan Stephens (2012:567) juga menjelaskan terdapat sejumlah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan *collaborative governance* antara lain tahap *assesment, initiation, deliberation dan implementation*.

Jika mengacu pada tahap-tahap pelaksanaan *collaborative governance* yang dikembangkan Morse dan Stephens, pada tahap *assesment* maka seharusnya

terdapat dukungan atau sponsor dari pihak lain namun hingga saat ini hal tersebut belum dilakukan, selain itu tidak jelasnya hak kepemilikan dan pengelolaan Pantai Payangan menjadikan kolaborasi harus dilakukan. Kelemahan pada tahap *initiation* yaitu kurang terjadwalnya kegiatan musyawarah dan pertemuan rutin seluruh *stakeholder*. Kemudian pada tahap *deliberation* kolaborasi antar keduanya masih menggunakan aturan dasar sementara berupa akta sebagai landasan hukum dalam sebuah pengelolaan. Dan pada tahap terakhir *implementation*, kurangnya koordinasi antar *stakeholder* sehingga masyarakat lebih dominan dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan oleh Pemerintah Desa dengan komunitas wisata. Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan terkait hal pembagian tugas dan tanggung jawab baik Pemerintah Desa maupun komunitas wisatanya. Namun dengan kondisi tersebut, upaya pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan tetap berjalan dan menghasilkan beberapa perubahan baik.

Berawal dari latar belakang mengenai alasan diperlukannya kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan, menariknya kolaborasi Pemerintah Desa Sumberejo dengan komunitas wisata atau masyarakat dalam pengelolaan destinasi Pantai Payangan, serta dengan ragam potensi wisata Pantai Payangan yang patut untuk dikelola dengan berbagai perubahan positif yang terjadi pada pariwisata Pantai Payangan menjadi lebih baik, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Desa Sumberejo dan komunitas wisata dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan dalam upayanya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan atau mencari solusi atas masalah yang timbul. Oleh karena itu, sebagai langkah awal perlu dipahami apa sebenarnya masalah itu. Masalah dapat digambarkan sebagai suatu perasaan keingintahuan, kegundahan dan kebingungan yang timbul akibat adanya ketidakjelasan atau suatu fenomena yang terjadi. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mengapa masalah itu terjadi sekaligus menimbulkan keingintahuan peneliti terkait solusi bagi penyelesaian masalah tersebut. Menurut Silalahi (2012:44) masalah adalah perasaan tidak



menyenangkan dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu. Lebih lanjut masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena. Berbeda dengan masalah, Sugiyono (2001:35) menjelaskan bahwa rumusan masalah diartikan sebagai suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Pengertian mengenai masalah di atas dan dipadukan dengan latar belakang yang dibangun peneliti untuk mengadakan penelitian ini menuntun peneliti merumuskan permasalahan yang muncul dalam kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan antara Pemerintah Desa Sumberejo dengan komunitas wisata serta kelompok masyarakat adalah “bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Desa Sumberejo dengan komunitas wisata dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian menurut Faisal (1992:29) adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Tujuan penelitian merupakan target yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Hal ini karena tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai atas jawaban rumusan penelitian.

Berdasarkan definisi dan pengertian tujuan penelitian di atas. Peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya sebagai berikut:

“Mendeskripsikan Kolaborasi antara Pemerintah Desa Sumberejo, Komunitas Wisata dan Kelompok Masyarakat Desa Sumberejo dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Pantai Payangan.”

## 1.4 Manfaat Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *value* baik secara akademis maupun praktis mengenai Kolaborasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pantai Payangan Ambulu Jember. Adapun kontribusi yang ingin dicapai sebagai berikut :

### 1.4.1 Bagi Dunia Akademis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi, wawasan dan pengetahuan secara konseptual mengenai kajian konsep pengembangan organisasi, konsep *collaborative governance* dan konsep pengembangan destinasi pariwisata.

### 1.4.2 Bagi Pemerintah

Di harapkan hasil penelitian dapat dijadikan masukan atau informasi positif bagi seluruh *stakeholder* yang ada pada instansi Pemerintah Desa khususnya yang terlibat dalam kegiatan Kolaborasi pengelolaan Destinasi Pariwisata Pantai Payangan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal.

### 1.4.3 Bagi Masyarakat luas

Di harapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bacaan untuk menambah sebuah pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa bangga memiliki dan ikut menjaga kelestarian destinasi pariwisata.

## BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Wardiyanta (2006:90) tinjauan pustaka berperan untuk menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian, pembangunan teori, konsep, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan.

### 2.1 Konsep Dasar

Konsep adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dalam sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Silalahi (2012:112). Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Dapat diartikan bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena tertentu.

Penelitian ini memiliki konsep dasar yang dibangun atas beberapa teori-teori mengenai fenomena sosial yang terkait bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Desa dengan komunitas wisata dalam pengelolaan Pantai Payangan yang meliputi:

1. *Governance*
2. *Stakeholder*
3. Kolaborasi
4. Pengelolaan destinasi pariwisata
5. Kerangka berpikir

### 2.2 *Governance*

Osborn dan Gaebler (dalam Rosidi Fajriani 2013:2) menyebutkan bahwa *governance* adalah sebuah proses pemecahan masalah bersama dan pemenuhan

kebutuhan masyarakat (*the process in which we solve our problem collectively and meet the society need*). Sedangkan menurut Meuthia Ganie dan Rahman (dalam Rosidi dan Fajriani 2013:2) *governance* merupakan suatu usaha kolektif antara negara dan sektor nonpemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial. Definisi lain mengenai *governance* yang dirumuskan IIAS (dalam Rosidi dan Fajriani 2013:3) merupakan suatu proses dimana semua elemen dalam masyarakat kekuatan dan otoritas, mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan keputusan tentang kehidupan publik, pembangunan ekonomi dan sosial.

Menurut Rosidi dan Fajriani (2013:3) perbedaan utama antara *government* dan *governance* adalah pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas publik, administrasi dan ekonomi dalam pengelolaan kegiatan suatu negara. Konsep *government* menunjuk bahwa pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, administrasi dan ekonomi dalam pengelolaan kegiatan suatu negara. Sedangkan konsep *governance* mengandung arti bagaimana suatu bangsa yang terdiri dari berbagai pelaku-pelaku yang berkepentingan (*stakeholder*) yang pada dasarnya terdiri dari pemerintah, masyarakat serta lembaga nonpemerintah mendistribusikan kekuasaan, mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Menurut UNDP *governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu:

1. Negara atau Pemerintahan (*state*)
2. Sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*)
3. Masyarakat (*society*)

Kooiman (1994:1) "*governance: new pattern of interaction between government and society*" keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan *governance* mengindikasikan adanya pola relasi antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* lain yang dapat berupa kolaborasi. Kolaborasi antar *stakeholder* tersebut terwujud dalam kegiatan distribusi kekuasaan, pengelolaan



sumber daya ekonomi dan sosial serta dalam upaya pengelolaan dan pengendalian berbagai masalah kolektif masyarakat dalam suatu negara.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai *governance* yang telah disampaikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif *good governance*, pengelolaan obyek wisata alam dilakukan dengan cara kolaborasi dan kerjasama sinergis oleh ketiga domain paradigma *good governance*, yaitu Pemerintah Daerah, sektor swasta dan masyarakat. Pada setiap ranah *governance*, terdapat peran-peran yang berbeda namun mempunyai fungsi yang komplementer dengan ranah yang lainnya dalam membentuk sebuah sistem *governance* (Wibowo dkk. 2002). Adapun prinsip-prinsip juga menjadi karakteristik *good governance* yaitu: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, equity, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, profesionalisme (Wibowo dkk, 2002). Kemudian dalam *governance* merupakan bentuk reformasi *government* atau reformasi administrasi publik tradisional yang semula hanya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang sangat hierarki, lambat, syarat akan aturan terikat, kurang efektif serta kurang tanggap menjadi pelaksanaan administrasi publik yang pelaksanaannya lebih bebas dari aturan terikat, lebih kreatif, lebih siap mengambil resiko dan tanggap terhadap kepentingan publik dengan melibatkan usaha kolektif dari berbagai bentuk lembaga atau *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga nonpemerintah.

### 2.3 Stakeholder

*Stakeholder* atau disebut juga pemangku kepentingan menurut Freeman (1983:91) dapat dipahami dengan mendefinisikan *stakeholder* menjadi dua definisi, yaitu definisi *stakeholder* secara luas dan definisi *stakeholder* secara sempit.

#### a. Definisi *stakeholder* secara luas

Sekelompok orang atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dalam makna luas ini

meliputi kelompok kepentingan publik, kelompok penentang, serikat kerja, pekerja, segmen pelanggan, *shareowners* dan *stakeholder* lain dalam arti luas.

b. Definisi *stakeholder* secara sempit

Sekelompok orang atau individu dalam organisasi yang tidak mandiri untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. *Stakeholder* dalam arti sempit ini meliputi pekerja, segmen pelanggan, beberapa supplier, perwakilan kunci pemerintah, *shareowners*, beberapa institusi keuangan dan mereka yang dapat masuk sebagai *stakeholder* dalam arti sempit.

Menurut Grunig dan Hunt dalam Rawlins (2006:4) terdapat empat model hubungan yang dapat mengidentifikasi kerja sama *stakeholder* yang sesuai dengan literatur kerja sama publik yaitu hubungan *enabling*, hubungan fungsional, hubungan normatif dan hubungan campuran. Berikut ini merupakan pembahasan terkait empat model hubungan kerja sama *stakeholder* menurut Grunig dan Hunts.

a. Hubungan *enabling*

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai sekelompok orang atau individu yang memiliki beberapa kontrol atau otoritas organisasi, seperti pemegang saham, kongres, badan legislatif dan regulator pemerintah serta dewan direksi, *Stakeholder* ini memungkinkan organisasi memiliki sumber daya dan otonomi untuk beroperasi. Ketika terjadi kemungkinan kerja sama terputus, sumber daya dapat ditarik dan otonomi organisasi dapat dibatasi.

b. Hubungan fungsional

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai fungsi pokok organisasi dan dibagi menjadi fungsi *input*, yaitu penyediaan tenaga kerja dan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa (seperti pekerja dan *supplier*) dan fungsi *output*, yaitu konsumsi barang dan jasa (yang meliputi konsumen, distributor, dan *retailers*)

c. Hubungan normatif

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai asosiasi atau kelompok yang dengan organisasi memiliki kepentingan bersama. *Stakeholder* dalam hubungan normatif berbagai nilai-nilai bersama, tujuan, masalah, dan sering mencakup pesaing yang terlibat pada industri atau asosiasi profesional.



d. Hubungan campuran

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai sekelompok orang atau individu yang tidak memiliki interaksi yang sering dengan organisasi, tetapi menjadi terlibat dalam aksi organisasi. *Stakeholder* yang dimaksud dalam hubungan campuran ini sering muncul dalam situasi krisis. Yang termasuk dalam hubungan ini adalah media, komunitas, aktivis, LSM dan sekelompok kepentingan spesial lainnya.

Berdasarkan identifikasi mengenai *stakeholder* tersebut. *Stakeholder* dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Pantai Payangan ini termasuk dalam hubungan normatif. Hal ini karena *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Pantai Payangan meliputi Pemerintah Desa Sumberejo dan komunitas wisata yang berasosiasi atau bekerja sama dalam hubungan campuran dalam pengelolaan seperti destinasi wisata Pantai Payangan dengan melibatkan unsur masyarakat dan komunitas disekitar destinasi pariwisata Pantai Payangan.

### 2.3.1 Pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pengelolaan Destinasi Wisata

Di suatu wilayah yang menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan dan termasuk di dalamnya usaha pengelolaan destinasi pariwisata, pada dasarnya tidak terlepas dari peran-peran atau kontribusi *stakeholder*. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, terdapat tiga komponen pelaku usaha dan *stakeholder* pengelolaan kepariwisataan di Indonesia yaitu:

1. Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Peran dan fungsi Pemerintah dalam proses pengelolaan destinasi pariwisata sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat berfungsi membuat regulasi pengelolaan kepariwisataan dalam bidang pengelolaan destinasi pariwisata berperan sebagai fasilitator dalam program promosi dan pemasaran pengelolaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)

## b. Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai fungsi melaksanakan tugas pembantuan untuk melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan Provinsi serta mengelola destinasi pariwisata Provinsi sesuai Peraturan Daerah masing-masing Provinsi tentang rencana pembangunan. Pariwisata Provinsi sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

## c. Pemerintah Daerah kabupaten atau Kota

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai peran utama untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain (sektor pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) untuk menyusun Peraturan Pariwisata Daerah Kabupaten atau Kota tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah Kabupaten atau Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

### 1. Dunia usaha

Dunia usaha merupakan swasta dalam perspektif *governance* memiliki andil sebagai penanam modal ataupun pelaku usaha yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan atau pasar wisata. Semua yang dilakukan oleh dunia usaha adalah dalam rangka memperoleh keuntungan atau nilai tambah atau usahanya di bidang kepariwisataan tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 terdapat dua lembaga dunia usaha (swasta) yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Dua lembaga tersebut meliputi:

- a. Badan Promosi pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPI).
- b. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang anggotanya meliputi;
  1. Pengusaha pariwisata
  2. Asosiasi usaha pariwisata
  3. Asosiasi profesi
  4. Asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata
  5. Masyarakat pariwisata

2. Masyarakat (sebagai tenaga kerja, pelaku kegiatan usaha kepariwisataan dan sebagai tuan rumah)

Dalam usaha pengelolaan destinasi wisata, masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting. Masyarakat berperan sebagai pelaku usaha pariwisata, tenaga kerja maupun tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata di lingkup destinasi pariwisata setempat. Menurut Sunaryo (2013:119) masyarakat memandang kegiatan kepariwisataan sebagai peluang untuk mendapatkan nilai tambah di bidang ekonomi maupun di bidang lain seperti kebanggaan identitas, kebersihan, keindahan, dan kualitas lingkungan semakin baik.

Sunaryo (2013:119) berpendapat bahwa perlu adanya hubungan sinergis dan *symbolic mutualistic* dari segenap *stakeholder* yaitu Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata.

## 2.4 Kolaborasi

Secara umum, kolaborasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama antar individu, individu dengan organisasi atau antar organisasi dalam rangka menyelesaikan masalah bersama atau mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai kooperasi dalam rangka menyelesaikan konflik, dengan cara mengelola konflik yang ada dalam organisasi sampai menemukan kata sepakat.

Dalam praktik administrasi publik, kolaborasi merupakan strategi baru pelaksanaan *governance* untuk melaksanakan pengambilan dan implementasi kebijakan dengan mengedepankan konsensus dari *multiple stakeholders* yang terdiri dari pemerintah, lembaga non-pemerintah serta masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik atau mengelola program publik.

Definisi *collaborative governance* yang disampaikan oleh Ansel dan Gash (2007:544) tersebut menekankan pada enam kriteria penting yaitu:

1. Forum ini diprakarsai oleh lembaga-lembaga publik atau instansi
2. Peserta dalam forum ini termasuk aktor non-pemerintah
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga-lembaga publik
4. Forum secara resmi terorganisir dan memenuhi unsur-unsur kolektif
5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak dicapai dalam prakteknya)
6. Fokus kerja sama adalah kebijakan publik atau manajemen publik

Morse dan Stephens (2012:566) berpendapat bahwa *collaborative governance* yaitu:

*“Collaborative governance is this an umbrella term that encompasses various interweaving strands of public administration scholarship including intergovernmental and interagency collaboration, regionalism, cross-sector partnerships, public service networks (or simply network studies), consensus building, and public engagement.”*

Berdasarkan pendapat di atas tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan istilah umum yang mencakup berbagai untaian jalinan keilmuan administrasi publik termasuk kolaborasi antar pemerintah, antar lembaga, kedaerahan, kerjasama lintas sektor, jaringan pelayanan publik, pembangunan konsensus dan keterlibatan publik. Sedangkan Ansell dan Gash (2007:545) menjelaskan *collaborative governance* sebagai berikut:

*“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision making process that is formal. Consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.”*

Mengenai *collaborative governance* tersebut dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan aransemen pengaturan pemerintahan yang melibatkan lebih dari satu lembaga publik bersama *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi konsensus dan deliberatif.



Kolaborasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan atau mengelola aset atau program publik. Terdapat sejumlah tahapan-tahapan dalam kolaborasi . Berikut merupakan tabel tahapan dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens.

**Tabel 2.1 Tahapan Pelaksanaan Collaborative Governance oleh Morse dan Stephens, (2012:567)**

<i>Assesment</i>	<i>Intiation</i>	<i>Deliberation</i>	<i>Impelentation</i>
<i>Is collaborating necessary?</i>	<i>How to frame the issue?</i>	<i>How to develop effective working group?</i>	<i>Who will do that?</i>
<i>Are precondition in place?</i>	<i>How to engage stakeholder?</i>	<i>What group rules?</i>	<i>How to broaden support?</i>
<i>Who are the stakeholders?</i>	<i>Who/what else is needed?</i>	<i>How to invent options and decide?</i>	<i>What kind of governance structure?</i>
<i>Who might fill key roles (sponsor, convener and facilitator)?</i>	<i>What kind of process?</i>	<i>How to facillitate manual learning?</i>	<i>How to monitor progress?</i>

Sumber : *Teaching Collaborative governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. Journal of Public Affairs Education. 37 (1):71-102.(2012)*

Tahapan pertama dalam proses kolaborasi adalah penilaian (*assesment*). Tahap ini membahas tentang kondisi awal yang mempengaruhi apakah kolaborasi diperlukan dan memungkinkan atau tidak. Tahapan ini dapat diartikan sebagai tahap penilaian, penilaian dalam rangka mengidentifikasi apakah kolaborasi dibutuhkan atau tidak untuk dilaksanakan. Tahapan penilaian meliputi beberapa kegiatan yaitu:

- a. Memahami faktor-faktor kontekstual misalnya sejarah, kerjasama dan insentif kelembagaan atau kendala kerjasama (Ansell dan Gash, 2008: Bryson et al., 2006 (dalam Morse dan Stephens, 2012:568))
- b. Identifikasi *stakeholder* (chrisslip, 2002; Gray,1989; Linden, 2010; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:568));



- c. Kesepakatan umum mengenai masalah atau tujuan bersama yang hendak dicapai (Bryson et al, 2006; Gray, 1989; Linden, 2010 dalam Morse dan Stephens (2012:568))
- d. Komitmen untuk mengejar solusi kolaboratif (Linden, 2010 dalam Morse dan Stephens (2010:568))
- e. Identifikasi peran kunci yang termasuk konvener, sponsor serta identifikasi sumber daya (Carson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989; Bryson et al, 2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568)).

Dalam rangka mengidentifikasi tahapan penelitian apakah kolaborasi dibutuhkan dan memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak.

Tahapan selanjutnya ialah tahapan inisiasi. Tahapan ini mencakup kegiatan rapat *stakeholder*, membangun kelompok kerja dan proses desain (Carlson,2007; Chrislip,2002; Gray, 1989, Luke 1998 (dalam Morse dan Stephens, 2012;568)). Berbeda dengan tahapan penilaian yang lebih menekankan pada kegiatan analisis kemampuan, tahapan inisiasi lebih menekankan pada *soft skill* penyelenggaraan kerjasama, membangun kerjasama dan membentuk tim (alexander, 2006 dalam Morse dan Stephens (2012;568)).

Berhasilnya membangun *stakeholder* untuk bekerjasama, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan musyawarah (Deliberation). Tahapan ini mencakup kegiatan membangun aturan dasar (Gray,1989;Luke, 1998 (dalam Morse dan Stephens, 2012;568)). Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan musyawarah dan dialog sebagai bagian proses belajar bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan (Carlson,2007; Chrislip, 2002; Gray, 2008 (dalam Morse dan Stephens, 2012;568)). Pada akhirnya tahapan musyawarah mencapai kesepakatan kolaboratif (Carlson,2007 ; Chirslip, 2002;Gray, 1989; Luke 1998 (dalam Morse dan Stephens.2012:568)).

Tahapan implementasi merupakan tahapan terakhir dalam membangun kolaborasi *governance* yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan berikut ini :

- a. Merancang struktur governance (Ansell dan Gash, 2008; Bryson et al, 2006; Gray 1998; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569));
- b. Membangun dukungan konstituen (Chrislip, 2002, Gray, 1989; Linden, 2010; Gray, 1998; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569)).
- c. Memantau perjanjian, evaluasi hasil dan mengelola kerjasama (Chrislip, 2002, Gray, 1998; Linden, 2010; Gray, 1998; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569)).

Tahapan implementasi inilah yang merupakan tahapan yang menentukan apakah kolaborasi itu dapat terus dilangsungkan atau justru sebaliknya ketika dalam proses kerja sama terjadi suatu permasalahan.

Dari pengertian mengenai tahapan-tahapan kolaborasi, peneliti memilih untuk meneliti semua tahapan-tahapan dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Payangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberejo dan Komunitas Wisata setempat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tahap-tahap kolaborasi dalam teori *Collaborative Governance* oleh Morse dan Stephens.

#### 2.4.1 Bentuk-bentuk Perjanjian Kerja Sama

Menurut Wawan Muhwan (2011:126) bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan atau tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian di bawah tangan hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Akan tetapi, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalnya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang. Untuk itu, adalah notaris, camat PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada tiga fungsi akta notaris (akta otentik) yaitu:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa semua hal yang tertulis dalam perjanjian menjadi tujuan dan kewenangan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta notaris merupakan bukti prima facie mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisasi suatu fakta. Dalam penelitian ini, usaha kolaborasi Pemerintah Desa dengan komunitas wisata dalam pengelolaan wisata di Pantai Payangan ini menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan.

## 2.5 Pengelolaan Destinasi Pariwisata

### 2.5.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (*no manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus sesuatu untuk mencapai tujuan. Menurut Prajudi dalam Adisasmita (2011:21) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu rencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu.

Soekanto dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

#### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Bintoro Cokro Tjokroadmudjoyo dalam Adisasmita (2011:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.



Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Adisasmita (2011:24) mengemukakan pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Westra, dkk dalam Adisasmita (2011:24) mengemukakan pelaksanaan penelitian sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

### 3. Pengawasan

Menurut Handoko dalam Adisasmita (2011:25) pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk menilai suatu proses apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu pengawasan.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan proses atau kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar dapat memenuhi target tujuan yang ada.

#### 2.5.2 Pengertian Destinasi

Menurut Hardinoto (1996:15) destinasi diartikan sebagai kawasan spesifik yang dipilih seorang pengunjung, ia dapat tinggal selama waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) menyebutkan destinasi pariwisata atau disebut juga daerah tujuan wisata sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Kawasan yang dipilih wisatawan untuk melakukan aktivitas wisata menunjukkan destinasi pariwisata dengan pertimbangan kawasan tersebut memiliki unsur-unsur kepariwisataan seperti layanan produk wisata, fasilitas



umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, atraksi, hiburan, masyarakat yang harus dipandang secara holistik dan saling terkait satu sama lain secara sistemik yang saling menunjang dalam pelaksanaan kepariwisataan.

Suatu destinasi pariwisata yang memiliki keunikan unsur-unsur kepariwisataan akan mempengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya usaha pengembangan destinasi pariwisata. BO Svenson, Sara Nordin dan Arved zflsgeast (2005:32) menyebutkan “ *Destination development is here simply understood as process aiming at improving the attractiveness and functioning of places and regions as visiting areas*” . Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami pengelolaan destinasi pariwisata merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dan fungsi objek dan kawasan sebagai area kunjungan. Dari peningkatan daya tarik kunjungan tersebut meliputi peningkatan unsur-unsur kepariwisataan yang meliputi seperti layanan produk wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, atraksi, hiburan, masyarakat yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata. Peningkatan unsur-unsur kepariwisataan tersebut dilakukan secara holistik dan terkait satu sama lain dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata.

### 2.5.3 Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan dalam sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan sepenuhnya untuk bekerja atau mencari keuntungan di tempat yang dikunjungi, melainkan untuk menikmati perjalanan tersebut guna berlibur atau berekreasi untuk menyegarkan pikiran. Yoeti (1996:109). Sedangkan menurut Salah Wahab (1982:20) pariwisata merupakan suatu industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.

Berbeda dengan kedua definisi tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang dalam Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jika di awal di sebutkan definisi pariwisata sangatlah beragam sesuai dengan siapa dan apa tujuan dari pendefinisian peristiwa itu. Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah bahwa tidak ada suatu definisi tunggal yang dapat menggambarkan secara tepat apa itu pariwisata.

Menurut Wahab (1996:6) menyebutkan bahwa seseorang melakukan perjalanan pariwisata guna memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-macam keinginannya. Pariwisata sebagai suatu gejala terwujud dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Menurut jumlah orang yang bepergian
  - a. Pariwisata individu
  - b. Pariwisata rombongan
2. Menurut maksud bepergian
  - a. Pariwisata rekreasi atau pariwisata santai
  - b. Pariwisata budaya
  - c. Pariwisata pulih sehat
  - d. Pariwisata sport
  - e. Pariwisata temu wicara (konvensi)
3. Menurut alat transportasi
  - a. Pariwisata darat
  - b. Pariwisata tirta (air)
  - c. Pariwisata dirgantara (udara)
4. Menurut letak geografis
  - a. Pariwisata domestik nasional
  - b. Pariwisata regional
  - c. Pariwisata international
5. Menurut umur

- a. Pariwisata remaja
- b. Pariwisata dewasa
6. Menurut jenis kelamin
  - a. Pariwisata pria
  - b. Pariwisata wanita
7. Menurut tingkat harga dan tingkat sosial
  - a. Pariwisata taraf lux
  - b. Pariwisata taraf menengah
  - c. Pariwisata taraf menengah kebawah

Definisi pariwisata sangatlah beragam sesuai dengan siapa dan apa tujuan dari pendefinisian pariwisata itu. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada suatu definisi tunggal yang dapat menggambarkan secara tepat apa itu pariwisata.

#### 2.6 Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 disebutkan bahwa :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Level pemerintahan pada penelitian ini yaitu Pemerintah Desa, dimana sasaran penelitian pada destinasi wisata Pantai Payangan merupakan obyek wisata

alam yang dimiliki oleh suatu wilayah pedesaan yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat atau komunitas setempat.

## 2.6.1 Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 pasal 1 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini difokuskan kepada Pemerintah Desa Sumberejo, dimana Pemerintah Desa Sumberejo merupakan salah satu *stakeholder* dalam kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan.

## 2.6.2 Kewenangan Desa

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 19 tentang desa, kewenangan desa terdiri dari:



- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 pasal 1 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa, Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat

Kewenangan lokal berskala desa merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa baik masalah maupun urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, saluran irigasi, tempat pemandian umum, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni, perpustakaan desa, sanggar seni dan belajar dan jalan desa. Berbagai jenis kewenangan lokal ini merupakan contoh konkret. Namun kewenangan lokal berskala Desa tidak terbatas pada contoh itu, melainkan sangat terbuka dan bisa berkembang lebih banyak sesuai dengan konteks lokal dan prakarsa masyarakat.



## 2.6.3 Wilayah Kewenangan

Wilayah kewenangan dalam penelitian kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan merupakan kewenangan lokal berskala desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa pada pasal 9 salah satu kewenangan lokal berskala desa dibidang pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. Selain itu pada pasal 12, Desa memiliki kewenangan dibidang ekonomi lokal desa yaitu pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota. Begitu juga didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa ada pasal 63 yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Dengan adanya peraturan di atas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola pariwisata untuk kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran Pemerintahan Desa sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pengelolaan pariwisata yang optimal.

## 2.7 Komunitas Wisata

### 2.7.1 Pengertian Komunitas

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme dan lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu didalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. (Wenger, 2002:4). Menurut Crow dan Allan komunitas dapat terbagi menjadi 2 komponen:

1. Berdasarkan lokasi atau tempat wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat dimana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis.

2. Berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku dan ras.

Loren O.Osborn dan Martin H.Neumeyer (1984:59) pada dasarnya setiap orang itu lahir dalam suatu keluarga, dan pada mulanya dia tidak mengetahui bahwa ia merupakan anggota dari suatu ketetangaan. Akan tetapi, apabila dia mulai dapat berjalan serta bermain, maka dia akan bermain dengan anak-anak tetangga atau beberapa dari mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, dia akan mengetahui bahwa ia tinggal dalam suatu kampung atau suatu desa atau juga dalam suatu kota. Pada tahap selanjutnya dia akan mengetahui pula bahwa dia merupakan anggota suatu bangsa atau suatu negara.

## 2.7.2 Pengertian Wisata

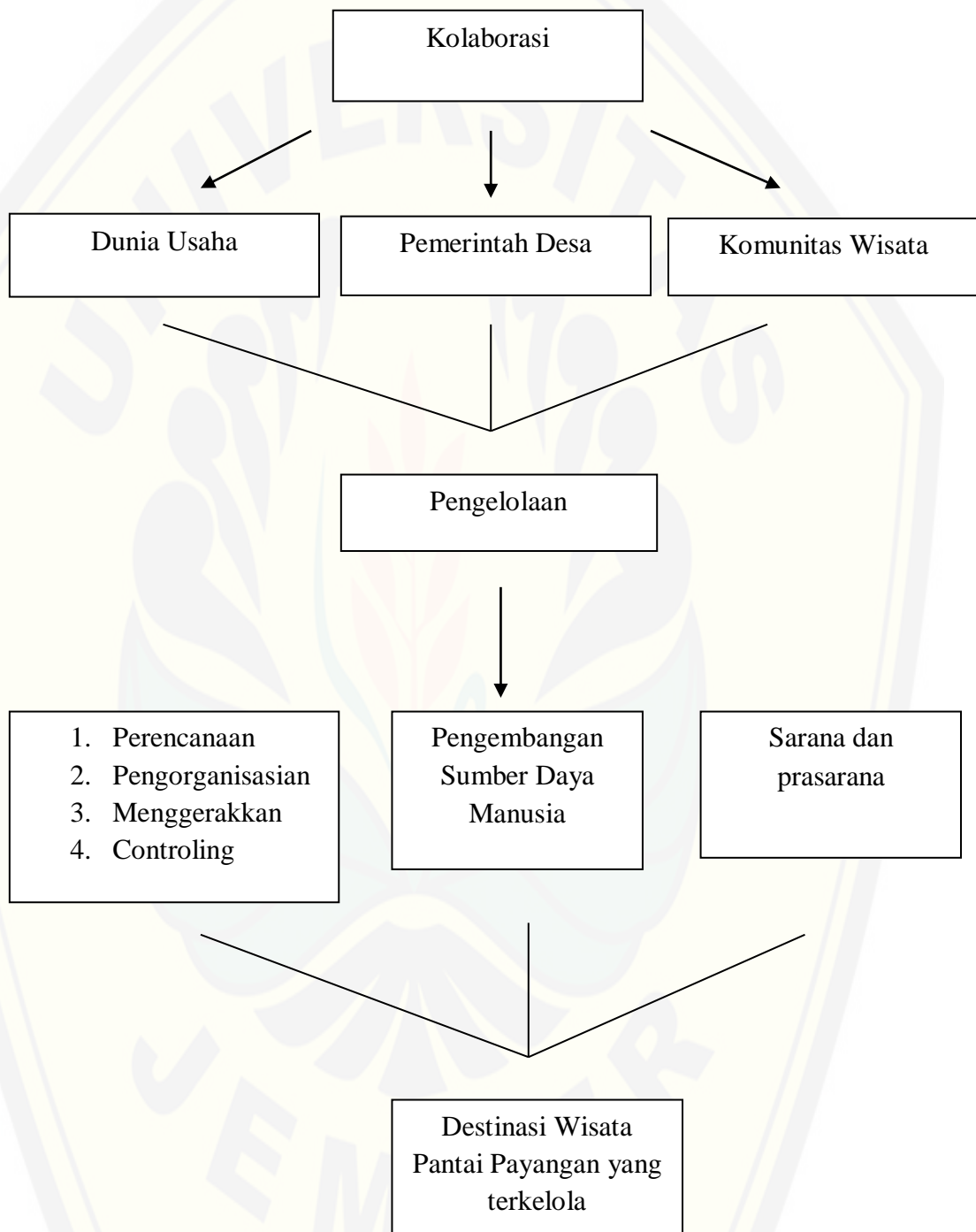
Menurut Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 Wisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan manusia baik perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, pengembangan diri dan sebagainya dalam kurun waktu yang singkat atau sementara waktu.

Dari kedua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunitas wisata merupakan sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme dan lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama yang menggeluti kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

## 2.8 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kolaborasi dalam pengelolaan destinasi pariwisata Pantai Payangan Ambulu Jember. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibangun peneliti, berikut ini merupakan kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sehingga tujuan penelitian ini

dapat tercapai yang pada akhirnya penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis terkait objek dan bahasan penelitian.



### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Metode menurut Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Sedangkan metode penelitian menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:22) merupakan penggunaan aspek epistemologis yang diterangkan dalam bab tersendiri secara terperinci dan jelas. Menurut Sugiyono (2011:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, sistematis. Metode merupakan suatu penekanan strategi, proses dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang hendak diteliti. Penelitian merupakan proses, mulai dari proses berpikir untuk mencoba memberikan jawaban atas suatu permasalahan. Dengan adanya penelitian, diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam mencari jawaban atas suatu permasalahan yang terjadi. Oleh karena itulah, metode penelitian memiliki suatu metode penelitian yang sesuai dengan objek yang diteliti untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
2. Fokus Penelitian
3. Waktu dan Lokasi Penelitian
4. Sumber Data
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Penentuan Informan
7. Metode Analisis Data
8. Teknik pemeriksaan Keabsahan Data

## 3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:13) mengemukakan jenis penelitian sebagai penegasan kategori penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2002:3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif seperti yang dikemukakan Silalahi (2012:38) yang menyebutkan bahwa penilaian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam.

Penelitian dengan jenis deskriptif berarti adalah data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dari uraian tersebut peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berkaitan dengan masalah yang diangkat, peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas tentang bagaimana kolaborasi pengelolaan antara Pemerintah Desa Sumberejo dan Komunitas wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

## 3.2 Fokus Penelitian

Sugiyono (2007:209) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dapat dikatakan fokus



penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan peneliti menentukan kemana arah penelitiannya.

Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti menetapkan destinasi wisata Pantai Payangan sebagai obyek fokus penelitian. Dalam suatu penelitian, haruslah memiliki fokus penelitian yang jelas sehingga dapat memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi Pemerintah Desa Sumberejo dengan Komunitas wisata dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

### 3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen yang penting dalam sebuah penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan pengumpulan data yang kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember. Adapun alasan lokasi di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dikarenakan desa ini memiliki potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal yaitu obyek pariwisata Pantai Payangan dan alokasi dana pengelolaan pariwisata Pantai Payangan belum terealisasi dengan baik yang seharusnya digunakan untuk membantu kegiatan Pemerintahan dan pembangunan desa serta fasilitas penunjang pariwisata.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2018-Februari 2018, dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2015-2018 dimulai dari pengembangan Pantai Payangan yang telah terbukti mendatangkan banyak wisatawan hingga sekarang.

## 3.4 Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2002:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yaitu penyedia informasi yang mendukung menjadi pusat perhatian peneliti. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.

2. Data sekunder

Yaitu pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data ini berupa dokumen, arsip serta majalah yang berhubungan keperluan peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder untuk mengetahui hasil yang hendak dicapai.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan bahwa teknik dan alat pengumpulan data merupakan cara dan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, atau alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data yang akan mempermudah peneliti untuk

meneliti dan menyelesaikan masalah. Adapun penelitian data yang dipergunakan dalam penelitian ini.

## 1. Dokumentasi

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian. Menurut Usman dan Akbar (2003:73) dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Guba dan Lincoln (dalam Maleong,2014;217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini:

- a. Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong
- b. Berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian; dan
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks

## 2. Wawancara

Merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang pihak yaitu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban tas pertanyaan itu (Moleong, 2002:135). Peneliti menyimpulkan bahwa wawanacara merupakan cara memperoleh data dari narasumber dengan melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung.

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan teknik wawancara semistruktur, dengan artian pertanyaan berlangsung bebas namun tetap dalam rangka yang jelas terkait topik penelitian. Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

## 3. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dengan dekat keadaan obyek penelitian atau mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti. Untuk

mengetahui aktivitas dari obyek penelitian dan peristiwa-peristiwa yang mendukung tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi sistematis. Pengertian teknik observasi partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang obsever terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Sedangkan pengertian teknik observasi sitematis menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangka yang memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Pengamatan secara langsung dan membuat kerangka observasi terlebih dahulu untuk mengamati bagaimana kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan destinasi Pantai Payangan.

### 3.6 Penentuan Informan

Menurut buku pedoman penulisan karya ilmiah (2012:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal (dalam Sugiyono, 2011:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri berikut:

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. Berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai dan;
- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian melainkan lebih menekankan pada kedalaman informasi yang diperolehnya. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif maka



seorang peneliti membutuhkan seorang informan yang memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:218) menjelaskan bahwa *purpose sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya, orang yang dijadikan informan dalam penelitian tersebut dianggap paling tahu dan mengerti tentang apa yang menjadi objek penelitian.

### 3.7 Metode Analisis Data

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:103) analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sejalan dengan pendapat tersebut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:103) mendefinisikan analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Adapun alur kegiatan analisis kualitatif dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Reduksi Data

Menurut Mathew dan Michael (1992:16) reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil



tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari penelitian sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data yang dikumpulkan dan dianalisa itu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan keacakannya yakni validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.

#### 3.8 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi. Menurut Moleong (2002:178) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Lebih Spesifik peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kolaborasi melibatkan Pemerintah Desa Sumberejo dengan kelompok sadar wisata Desa Sumberejo sekaligus melibatkan masyarakat sekitar destinasi. Kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan dilakukan melalui tahapan
  - a) Tahap *assesment* kondisi awal Pantai Payangan oleh *stakeholder* dan perlunya diadakan kolaborasi antara Pemerintah Desa dengan komunitas wisata dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan.
  - b) Tahap inisiasi dilakukan melalui perencanaan dalam hal pengelolaan pariwisata yang bertujuan untuk mengelola kawasan pantai secara terencana guna menjaga kelestarian dan keutuhan laut dan pantai serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui usaha kolaborasi pengelolaan yang dibentuk melalui musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa Sumberejo, kelompok sadar wisata dan masyarakat.
  - c) Tahap deliberasi dengan menyatukan Pemerintah Desa Sumberejo dan Kelompok Sadar Wisata dalam usaha kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan melalui kegiatan, program dan *event* serta berpedoman sementara pada aturan dasar dalam pengelolaan melalui akta pendirian kelompok sadar wisata “Lestari Bahari” serta memfasilitasi proses belajar melalui rapat koordinasi sebagai wujud kolaborasi yang deliberatif.
  - d) Tahap implementasi seluruh *stakeholder* melaksanakan tugas masing-masing sebagai komitmen mereka untuk mengelola destinasi wisata Pantai Payangan. Berdasarkan atas tugas-tugas tersebut dapat ditentukan bahwa peran masing-masing *stakeholder* yaitu Pemerintah Desa sebagai pengawas dan pelindung, sedangkan kelompok sadar wisata yang menjalankan dan mengelola kepariwisataan dan masyarakat yang mendukung dan melaksanakan kegiatan kepariwisataan Pantai Payangan.

2. Kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan tidak sepenuhnya mencerminkan kolaborasi yang deliberatif namun adanya rapat evaluasi, koordinasi dan pembinaan sebagai wadah musyawarah antar *stakeholder* untuk menciptakan berbagai alternatif pilihan yang pada akhirnya diambil pilihan terbaik sebagai keputusan bersama secara mufakat menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kolaborasi yang deliberatif. Kendala yang terjadi selama kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan adalah fasilitas yang belum tertata rapi di area sekitar pantai, kurangnya perbaikan infrastruktur atau akses jalan menuju destinasi wisata yang tergolong kurang baik dan belum mendapatkan respon dari pemerintah, tidak rutinnya rapat evaluasi, koordinasi dan pembinaan dan yang terakhir kurangnya komunikasi antar *stakeholder* terkait.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan peneliti dari hasil analisis penelitian, peneliti dapat memberikan saran terkait kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan Desa Sumberejo sebagai berikut:

1. Perlu penataan berupa tempat parkir dan warung atau toko-toko di sekitar destinasi serta penambahan MCK dan tempat beribadah.
2. Mengusahakan perbaikan akses jalan menuju destinasi wisata.
3. Melaksanakan rapat evaluasi koordinasi dan pembinaan secara rutin agar ketika terjadi kendala-kendala kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Payangan dapat segera tertangani.
4. Meningkatkan komunikasi secara intens antar *stakeholder* terkait.
5. Membentuk struktur kolaborasi berdasarkan konsep Organisasi Pengelola Destinasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- A.Yoeti,Oka.Edisi Revisi 1996.*Pengantar Ilmu Pariwisata*.Bandung:Penerbit  
Angkasa
- Ansell.C& Gash, A(2008).*Collaborative governance in theory and practice*.  
Journal of Public Administration Research and Theory. 18, 543-571
- Chrislip,D,D(2002). *The collaborative leadership fieldbook: A guide for citizens  
and civic leaders*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Hadinoto,Kusdianto.1996.Perencanaan Pengembangan Destinasi  
Pariwisata.Jakarta:UI-Press
- Kooiman,Jan.1994.*Modern Governance (New Government-Society  
Interactions)*.London-Thousand Oaks-New Delhi:SAGE Publications.
- Moleong.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Morse, R.S.(2008).*Developing public leaders in an age of collaborative  
governance*. In R.S.Morse & T.F.Buss (Eds.), Innovation in public  
leadership development .Armonk,NY:M.E.Sharpe
- Rosidi, Abidarin. & Fajriani, Anggraeni. 2013. *Reiventing Government*.  
Yogyakarta: Penerbit Andi
- Silalahi, Ulber.2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama
- Sugiyono.2011.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &  
D*.bandung:Alfabeth
- Universitas Jember.2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember: Jember  
University Press
- Wahab, Salah.1996. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta:PT.Pertja
- Wardiyanta.2006.*Metode Penelitian Pariwisata*.Yogyakarta:Penerbit Andi
- Muhwan, Wawan.2011.*Hukum Perikatan*. Bandung:Pusaka Setia
- BPS Kabupaten Jember.2016. *Jember dalam Angka Tahun 2016*. Jember: BPS  
Kabupaten Jember.



Sunaryo, Bambang.2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata( Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*.Yogyakarta:Gava Media

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.2016. *Buku Database Informasi Pariwisata*. Jember: Dispar Jember

Usman, Husaini, Akbar, Purnomo S.2009, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta:Bumi Aksara

Adisasmita, Raharjo.2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta:Graha Ilmu

### **JURNAL**

Freeman, R. Edward dan David L. Redd. 1983. *Stocholders and Stakeholders on Corporate Governance*. California:California Management Review

Rawlins, Brad L. 2006. *Prioritizing stakeholders for public relations*. Brigham Young University

Ansell, Chris, Alison Gash.2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Oxford University Press On Behalf Of The Journal Of Public Administration Research and Theory. JPART 18:543-571

Morse, Ricardo S, and John B. Stephens.2012. *Teaching Collaborative Governance Phases, Competencies, and Cased Based Learning*. Journal of Public Affairs Education. JPAE 18 (3), 565-584.

BO Svenson, Sara Nordin dan Arvin Flagestad.2005. *A Governance Perspective on Development Exploring Partnership, Cluster and Inovation Systems*. Tourism Review, Vol.60 Iss:2, pp 32-37

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa



Undang-Undang No 10 Tahun 2009

Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 21 Tahun 2006

**Internet/e-book**

[www.antarajatim.com](http://www.antarajatim.com)

[www.wikipedia.geografisindonesia.go.id](http://www.wikipedia.geografisindonesia.go.id)

<https://jemberkab.go.id>

[www.kemenpar.go.id/asp?c=117&id=1198](http://www.kemenpar.go.id/asp?c=117&id=1198) (2016)

**LAMPIRAN**

A. Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA I  
PEMERINTAH DESA SUMBEREJO, KECAMATAN AMBULU,  
KABUPATEN JEMBER**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

**Daftar Pertanyaan !**

1. Kapan wisata Pantai Payangan dipertimbangkan menjadi destinasi objek wisata Kabupaten Jember?
2. Bagaimana prosesnya menjadi destinasi objek wisata?
3. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan wisata Pantai Payangan menjadi destinasi objek wisata di Kabupaten Jember?
4. Apakah ada struktur/Peraturan Desa yang mengatur pengelolaan pariwisata Pantai Payangan? jika ada, bagaimana proses pembentukannya? Jika tidak, mengapa tidak dibuat Peraturan Desa?
5. Apa peran pemerintah desa dalam pengelolaan objek wisata Pantai Payangan?
6. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata Pantai Payangan? seperti promosi, sarana dan prasarana ( akses jalan, tempat ibadah, kamar mandi, dan penginapan?)
7. Apakah ada organisasi/komunitas yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mengelola pariwisata pantai payangan? jika ada bagaimana struktur organisasinya?

8. Kerjasama apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan komunitas wisata yang ada di Pantai Payangan?
9. Apakah ada keterlibatan komunitas wisata dalam mengelola objek wisata Pantai Payangan?
10. Apa bentuk keterlibatan/partisipasinya?
11. Apakah komunitas wisata memiliki partisipasi yang tinggi untuk ikut mengembangkan objek wisata Pantai Payangan?
12. Semenjak adanya objek wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo ini, bagaimana dampak/pengaruh terhadap penghasilan masyarakat? sama saja, atau meningkat?
13. Bagaimana koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata Pantai Payangan? (terkait pembagian hasil)
14. Adakah agenda rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama komunitas wisata dan pihak pengelola untuk melakukan evaluasi?
15. Sejauh ini, apa yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Jember dalam mendukung pengelolaan pariwisata Pantai Payangan?

**PEDOMAN WAWANCARA II**

**KELOMPOK SADAR WISATA PANTAI PAYANGAN**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

**Daftar Pertanyaan !**

1. Bagaimana awal ide atau gagasan pembentukan destinasi objek wisata Pantai Payangan?
2. Kapan Pantai Payangan dipertimbangkan menjadi destinasi objek pariwisata di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana keputusan pembentukan tersebut diambil?
4. Apakah seluruh anggota kelompok sadar wisata terlibat dalam pengambilan keputusan?
5. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan?
6. Apakah ada musyawarah yang digunakan untuk menampung ide/gagasan saat kegiatan perencanaan ?
7. Setelah terbentuk menjadi objek wisata, bagaimana cara pokdarwis mempromosikan agar dikenal oleh masyarakat luas?
8. Siapa aktor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata Pantai Payangan?
9. Bagaimana proses pembentukan organisasi pokdarwis wisata Pantai payangan?
10. Apa peran dari kelompok dasar wisata dalam pengelolaan objek wisata Pantai Payangan?
11. Bagaimana struktur kelompok sadar wisata atau pembagian tugas dalam kegiatan kepariwisataan?

12. Bagaimana kelompok sadar wisata menggerakkan atau mengajak masyarakat setempat ikut berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan?
13. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan?
14. Apakah ada kerjasama antara pokdarwis dengan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam menyediakan homestay, souvenir, penyediaan air bersih hingga sarana dan prasarana? Kemudian kerjasama apa saja yang telah dilakukan kelompok sadar wisata dengan Pemerintah Desa ?
15. Keuntungan apa saja yang diperoleh kelompok sadar wisata dengan adanya wisata Pantai Payangan?
16. Apa ada pengaruh setelah adanya pariwisata Pantai Payangan dibentuk terhadap kehidupan masyarakat?
17. Bagaimana dampak bagi masyarakat sekitar setelah dibukanya objek wisata Pantai Payangan?
18. Adakah bantuan dana dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok sadar wisata dalam proses pengelolaan?
19. Bagaimana proses bagi hasil yang didapat dalam kegiatan kepariwisataan?
20. Apakah ada bentuk evaluasi atau pengendalian yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata? Jika ada, apa bentuk evaluasi atau pengendalian? bagaimana prosesnya?
21. Siapa saja yang terlibat dalam proses evaluasi atau pengendalian tersebut?
22. Sejauh ini, apa saja hambatan yang ditemui/dirasakan oleh kelompok sadar wisata dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata Pantai Payangan?



**PEDOMAN WAWANCARA IV**  
**KELOMPOK NELAYAN PANTAI PAYANGAN**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

**Daftar Pertanyaan !**

1. Bagaimana awal ide atau gagasan pembentukan destinasi objek wisata Pantai Payangan?
2. Kapan Pantai Payangan dipertimbangkan menjadi destinasi objek pariwisata di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana keputusan pembentukan tersebut diambil?
4. Apakah seluruh anggota kelompok nelayan terlibat dalam pengambilan keputusan?
5. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan?
6. Apakah ada musyawarah yang digunakan untuk menampung ide/gagasan saat kegiatan perencanaan ?
7. Setelah terbentuk menjadi objek wisata, bagaimana cara kelompok nelayan mempromosikan agar dikenal oleh masyarakat luas?
8. Siapa aktor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata Pantai Payangan?
9. Bagaimana proses pembentukan organisasi pokdarwis wisata Pantai payangan?
10. Apa peran dari kelompok nelayan dalam pengelolaan objek wisata Pantai Payangan?

11. Bagaimana struktur kelompok nelayan atau pembagian tugas dalam kegiatan kepariwisataan?
12. Bagaimana kelompok nelayan menggerakkan atau mengajak masyarakat setempat ikut berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan?
13. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan?
14. Apakah ada kerjasama antara kelompok nelayan dengan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam menyediakan homestay, souvenir, penyediaan air bersih hingga sarana dan prasarana? Kemudian, kerjasama apa saja yang telah dilakukan oleh kelompok nelayan dengan Pemerintah Desa?
15. Keuntungan apa saja yang diperoleh kelompok nelayan dengan adanya wisata Pantai Payangan ?
16. Apa ada pengaruh setelah adanya pariwisata Pantai Payangan dibentuk terhadap kehidupan masyarakat?
17. Bagaimana dampak bagi masyarakat sekitar setelah dibukanya objek wisata Pantai Payangan?
18. Adakah bantuan dana dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok nelayan dalam proses pengelolaan?
19. Bagaimana proses bagi hasil yang didapat dalam kegiatan kepariwisataan?
20. Apakah ada bentuk evaluasi atau pengendalian yang dilakukan oleh kelompok nelayan? Jika ada, apa bentuk evaluasi atau pengendalian? bagaimana prosesnya?
21. Siapa saja yang terlibat dalam proses evaluasi atau pengendalian tersebut?
22. Sejauh ini, apa saja hambatan yang ditemui/dirasakan oleh kelompok nelayan dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata Pantai Payangan?

**PEDOMAN WAWANCARA IV**

**MASYARAKAT SEKITAR**

Nama Narasumber :

Jenis Kelamin :

Umur :

Alamat :

Jabatan /Pekerjaan :

**Daftar Pertanyaan !**

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap pembentukan pariwisata Pantai Payangan?
2. Siapa yang hadir dalam musyawarah rencana pebetukan pariwisata tersebut?
3. Apakah semua masyarakat hadir/perwakilan dari setiap dusun/ hanya tokoh masyarakat desa?
4. Apakah ada kesempatan untuk menyampaikan ide tau gagasan saat kegiatan perencanaan pembentukan pariwisata Pantai Payangan?
5. Bagaimana jika ada tanggapan, saran atau masukan dari masyarakat?
6. Siapa yang mengambil keputusan dalam musyawarah pembentukan wisata?
7. Apakah seluruh masyarakat setuju dengan keputusan yang di ambil?
8. Siapa yang mengelola pariwisata tersebut? Apakah Bapak/Ibu/saudara ikut berpartisipasi dalam pengelolaan? Apa bentuk partisipasinya?
9. Bagaimana proses pembentukan organisasi pengelola pariwisata Pantai Payangan?
10. Apakah seluruh pengurus organisasi adalah masyarakat Desa Sumberejo?
11. Bagaimana pihak pengelola mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan wisata Pantai Payangan?



**B.Foto-foto Penelitian**



Suto Wijoyo ketua kelompok sadar wisata



Kepala Desa Sumberejo



Bapak Suyitno ketua kelompok nelayan  
"Lumba-lumba"



Bapak Suparto ketua kelompok nelayan  
"Baruna Jaya"



Bapak Ngadi selaku Kepala Dusun  
Payangan



Foto Rapat Dan Musyawarah Pemerintah  
Desa Dengan Pokdarwis

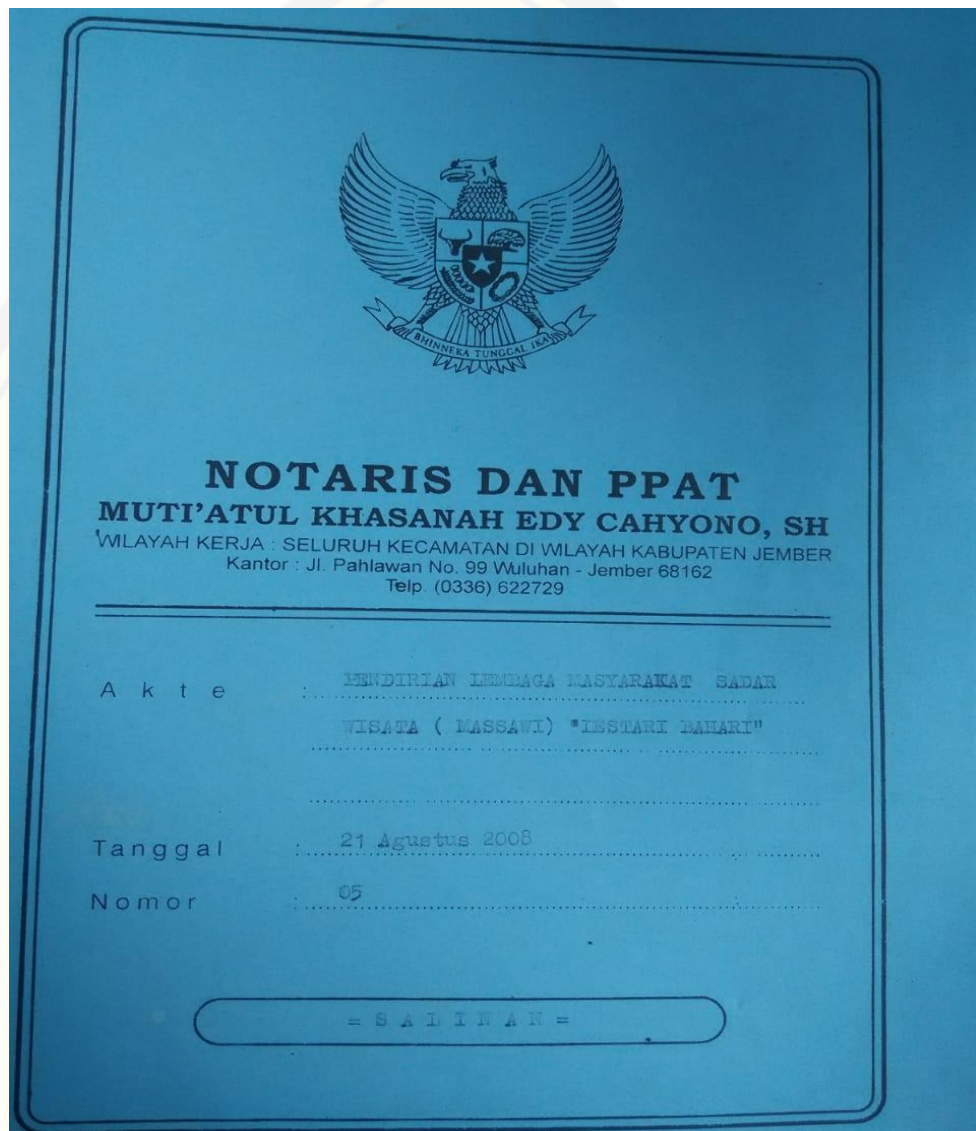


Peraturan Dan Tata Tertib Pantai Payangan





**B.Akta Notaris dan PPAT Kelompok Sadar Wisata Lestari Bahari Desa Sumberejo**



MUTI'ATUL KHASANAH EDY CAHYONO, SH

PENDIRIAN  
LEMBAGA MASYARAKAT SADAR WISATA  
(MASSAWI)  
'LESTARI BAHARI'  
Nomor : 05

- Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh--  
satu Agustus Tahun Dua ribu delapan-----  
(21-08-2008), Jam 13.30 WIBB (Tiga belas--  
tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Barat).--  
- Menghadap dihadapan saya, MUTI'ATUL-----  
KHASANAH EDY CAHYONO, Sarjana Hukum, yang--  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri-----  
Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal 4 April 2001, Nomor :  
C-146.HT.03.01, sebagai Notaris di Jember,  
yang berkedudukan di Wuluhan, dengan-----  
dihadiri oleh para saksi yang telah saya,--  
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan  
disebutkan pada bagian akhir akta ini,-----  
yaitu : -----



1. Tuan SUYUDI, lahir 16-03-1968, Swasta,--  
bertempat tinggal di Jalan HOS.-----  
Cokroaminoto Nomor 29 Rukun Tetangga  
01, Rukun Warga 09, Desa Dukuhdempok----  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.----
2. Tuan SUTO WIJOYO, lahir 07-10-1968,----  
Swasta, bertempat tinggal di Dusun----  
Watu ulo Rukun Tetangga 002, Rukun Warga  
039, Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu---  
Kabupaten Jember.-----
3. Tuan SULLAM, lahir 09-09-1969, Wiraswasta  
bertempat tinggal di Dusun Krajan kidul

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, ---  
Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten  
Jember.-----

-- Para penghadap saya Notaris kenal, ---  
Para penghadap menerangkan terlebih dahulu  
Bahwa untuk meningkatkan peran serta-----  
masyarakat sadar wisata khususnya yang  
berada di daerah Wisata Watu Ulo Desa-----  
Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten-----  
Jember, dengan berdirinya lembaga tersebut  
masyarakat dapat berperan aktif untuk-----  
melestarikan dan memajukan wisata Watu Ulo  
secara profesional, dan sebagai wadah----  
masyarakat daerah sadar wisata maka kami  
sepakat untuk bersama-sama mendirikan-----  
suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang-----  
bernama LEMBAGA MASYARAKAT SADAR WISATA  
atau biasa disingkat MASSAWI 'LESTARI  
BAHARI', bahwa untuk keperluan lembaga----  
tersebut telah dipisahkan dan-----  
disendirikan dana untuk menjadi simpanan--  
pokok kepunyaan dan pangkal kekayaan dari  
lembaga yang dimaksud uang tunai sebesar--  
Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),----  
dengan anggaran dasar seperti yang akan---  
disebut dibawah ini :-----

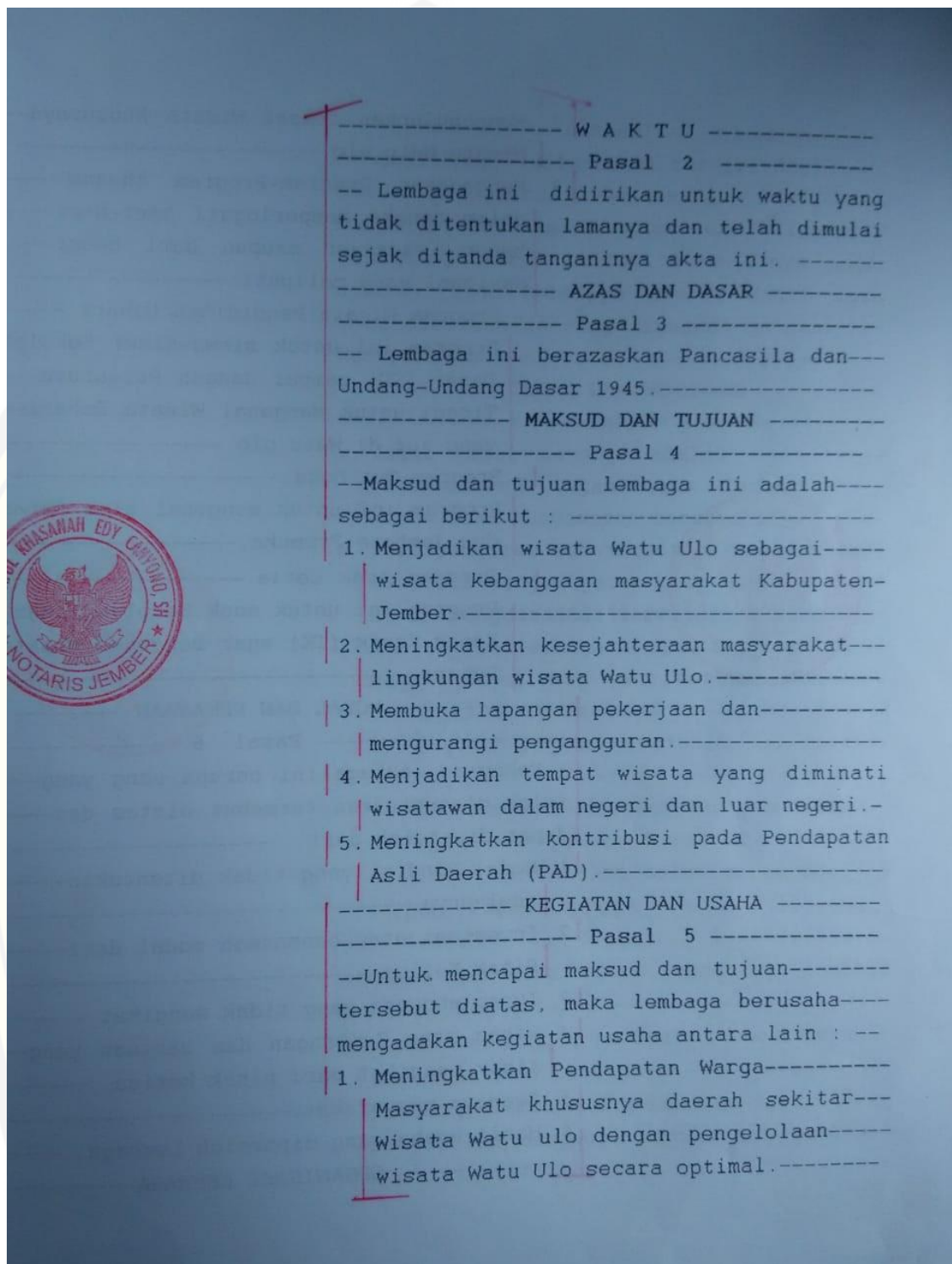
----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

--Lembaga ini bernama : -----  
LEMBAGA MASYARAKAT SADAR WISATA-----  
(MASSAWI) 'LESTARI BAHARI' yang berkedudukan  
di Jalan Watu ulo Nomor 28 Desa Sumberejo  
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.-----







2. Mempopulerkan tempat Wisata khususnya--

Wisata Watu ulo.-----

3. Mengadakan Program-Program khusus-----

dalam rangka memperingati hari-hari---  
besar Keagamaan maupun hari besar---  
Nasional yang meliputi:-----

- Program Wisata Pendidikan Bahari.-----

Program ini untuk siswa-siswi Sekolah  
Dasar (SD) sampai dengan Perguruan---  
Tinggi untuk mengenal Wisata Bahari--  
yang ada di Watu ulo.-----

- Program Out Bond.-----

Program ini untuk mengenal alam bebas  
dan Jambore Pramuka.-----

- Program Anak Ceria.-----

Program ini untuk anak Sekolah Taman-  
Kanak-Kanak (TK) agar mengenal Wisata  
Bahari.-----

----- MODAL DAN KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

--Kekayaan lembaga ini berupa uang yang---  
telah disendirikan tersebut diatas dan---  
dapat diperoleh dari : -----

1. Modal Pendiri yang tidak ditentukan----  
jumlahnya.-----

2. Investasi atau penanaman modal dari----  
Pihak Ketiga -----

3. Iuran anggota yang tidak mengikat -----

4. Hibah atau Sumbangan dan bantuan yang--  
tidak mengikat dari pihak ketiga. -----

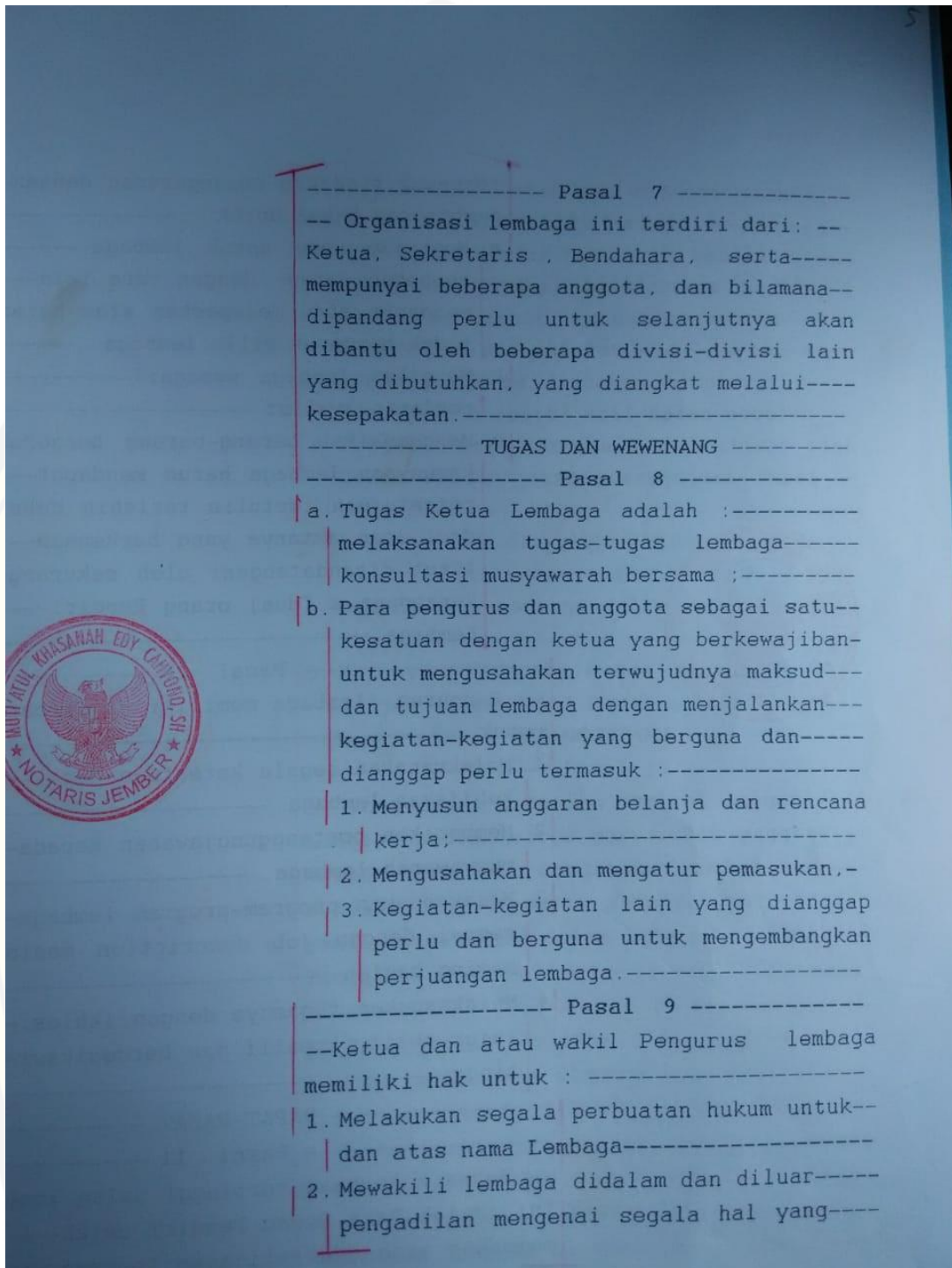
5. Swadaya masyarakat.-----

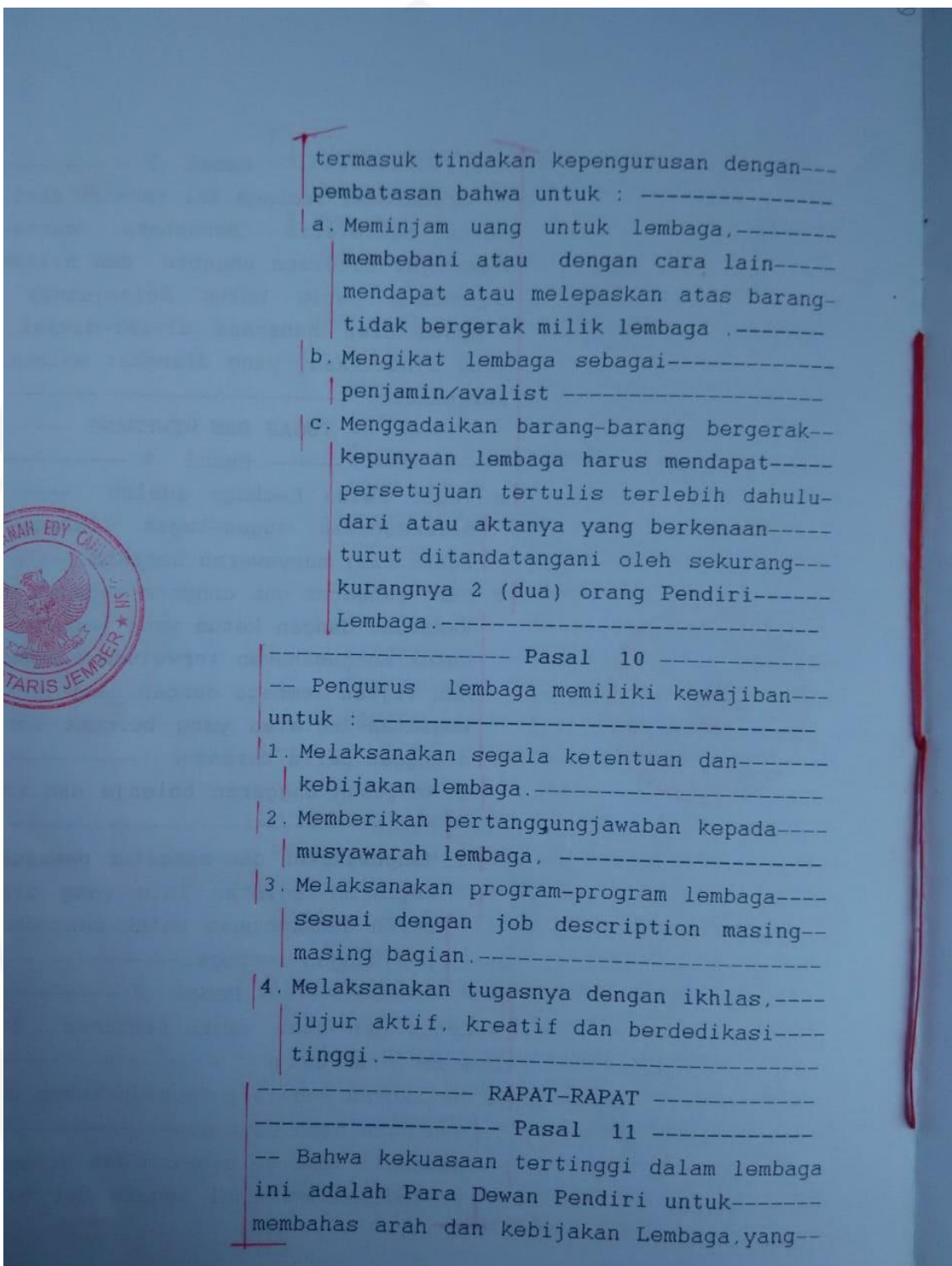
6. Hasil usaha yang diperoleh Lembaga. ----

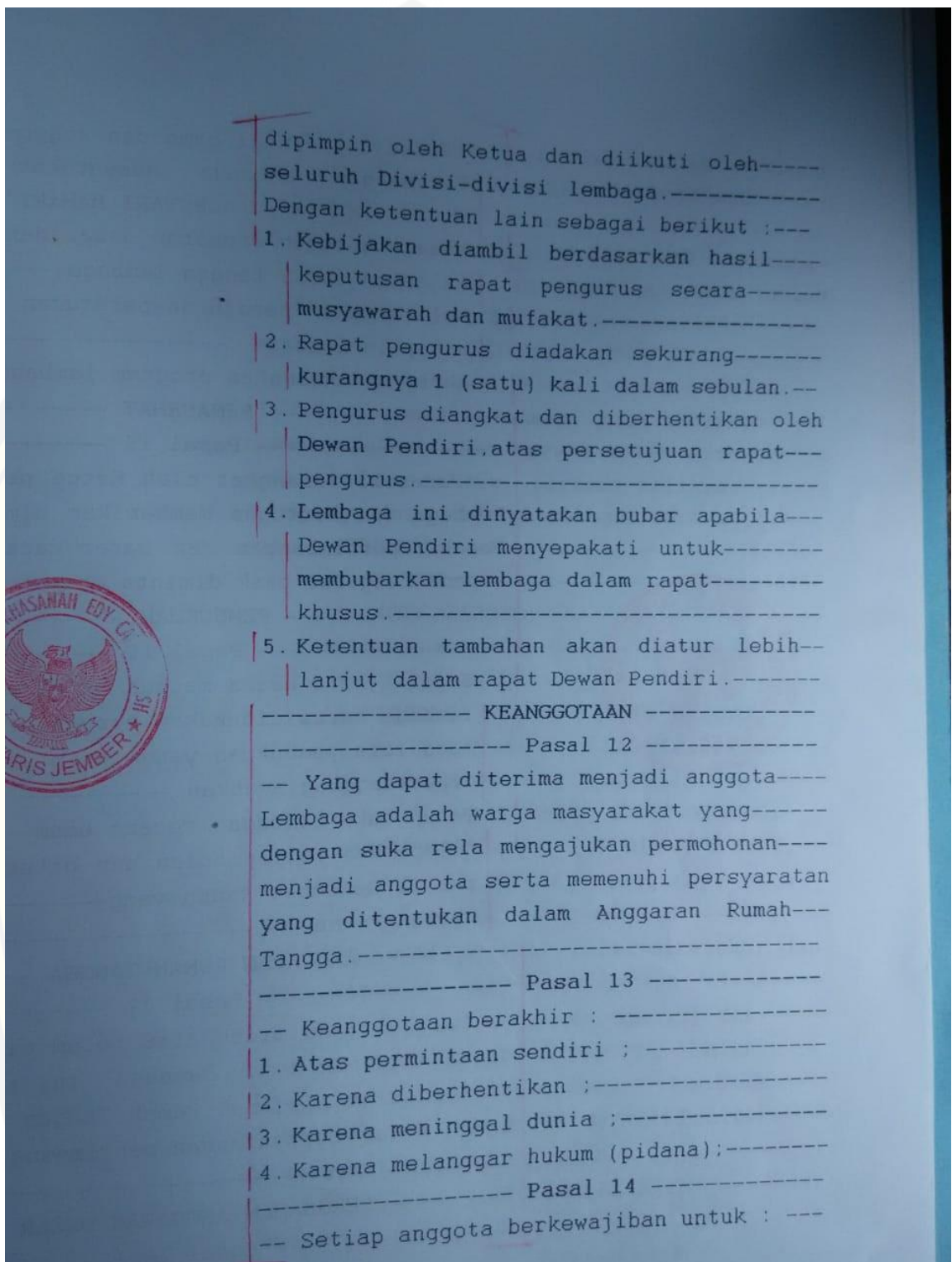
----- ORGANISASI LEMBAGA -----



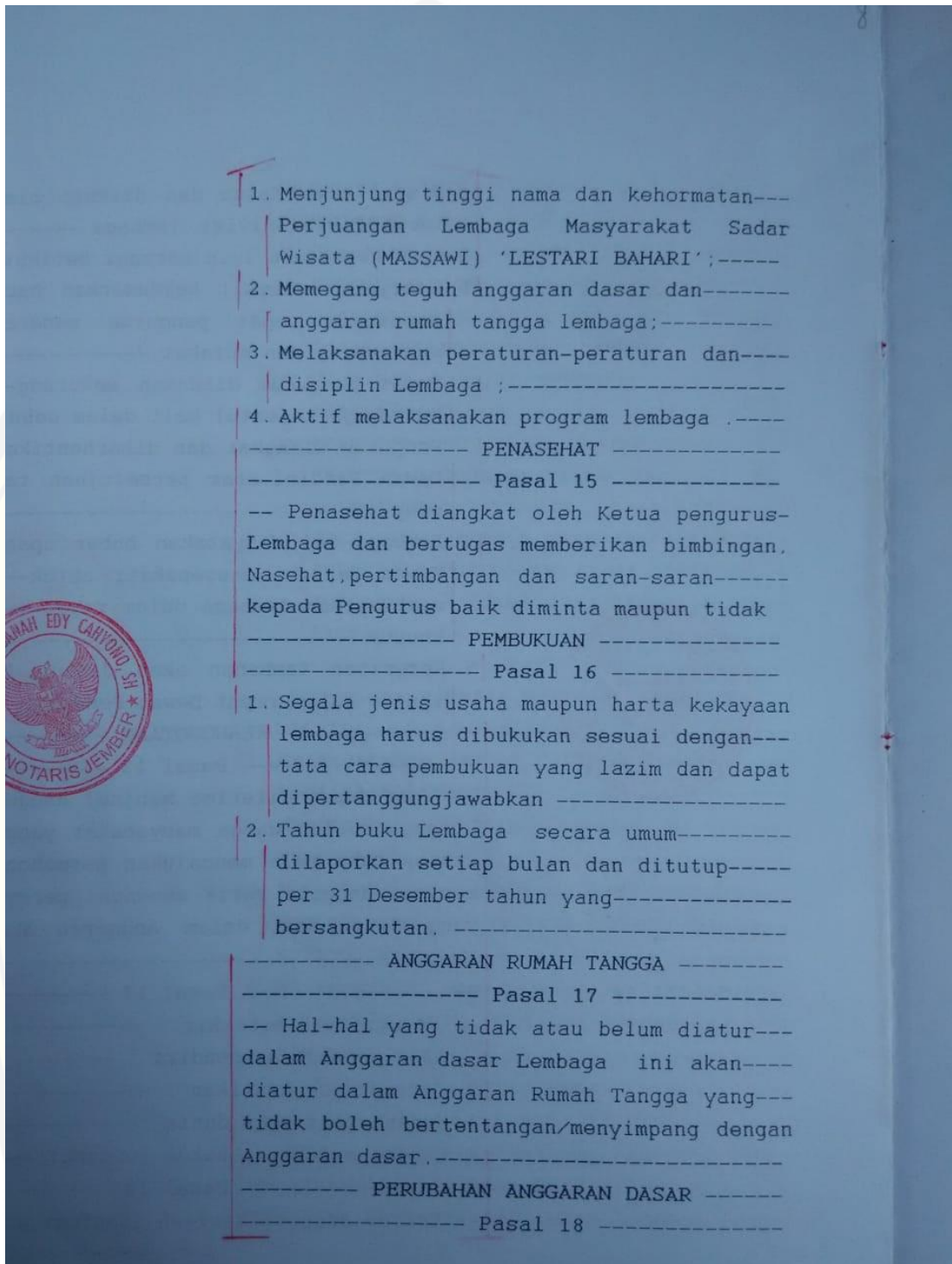














-- Dibuat dan diselesaikan di Wuluhan-----  
Jember, pada hari dan tanggal tersebut-----  
pada bahagian awal akta ini dengan-----  
dihadiri oleh : -----

1. S U Y A T I, dan -----
2. RATNA DWI UTAMI, keduanya karyawan-----  
kantor Notaris dan bertempat tinggal di-----  
Wuluhan-Jember, sebagai saksi-saksi.-----

-- Setelah saya, Notaris membacakan akta  
ini kepada para penghadap dan para saksi,  
maka segera para penghadap, para saksi dan  
saya, notaris menandatangani akta ini. ---

Dibuat dengan Satu coretan. Dua tambahan---  
dan Satu coretan dengan gantian.-----  
Minuta Akta ini telah ditandatangani-----  
dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA-----  
BUNYINYA.-----

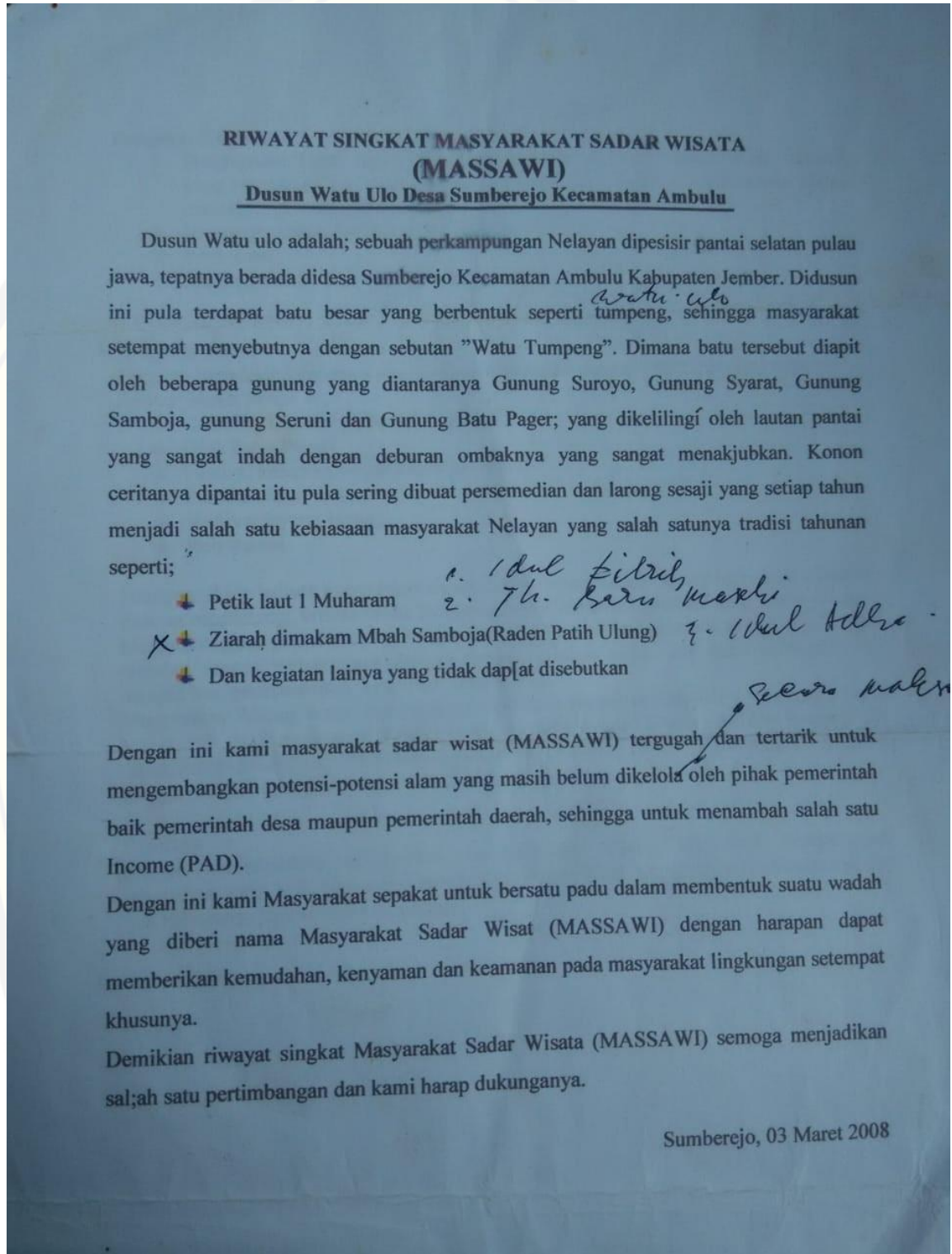
Notaris Jember



Pada hari ini: SELASA, tanggal 26 Agustus 2008,  
Akta Notaris ini telah didaftarkan didalam buku  
untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember  
dibawah Nomor: 47/2008.



D.Riwayat Singkat Masyarakat Sadar Wisata Desa Sumberejo



### **Program Khusus**

1. Penghijauan Guna untuk melestarikan Alam disekitar wisata Watu Tumpeng yang sementara ini masih terliha kritis dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat setempat dan pengunjung.
2. Memperkenalkan hasil laut dan Wisata
3. Petik Laut
4. Kunjungan hari-hari besar dan hari minggu.

### **Program Event**

Program ini adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan antara lain;

#### **Konser Musik pantai**

- 🚩 Camping Liburan perkemahan pantai
- 🚩 Olah Raga Pantai
- 🚩 Festival kesenian pantai dan Voly Pantai
- 🚩 Pameran hasil laut
- 🚩 Vestival layang-layang
- 🚩 Rely pantai

Harapan akhir bahwa masyarakat dapat diberi tempat untuk memikirkan nasib mereka dimasa mendatang, Wisata Watu Tumpeng bukan bahan Exsploitasi yang sifatnya hanya menguntungkan pribadi atau golongan,karena jika itu yang akan dilakukan niscaya hal tersebut sangat bertentangan dengan penguasa kasat mata yang pada akhirnya akan menjadikan permasalahan yang tidak akan selesai.

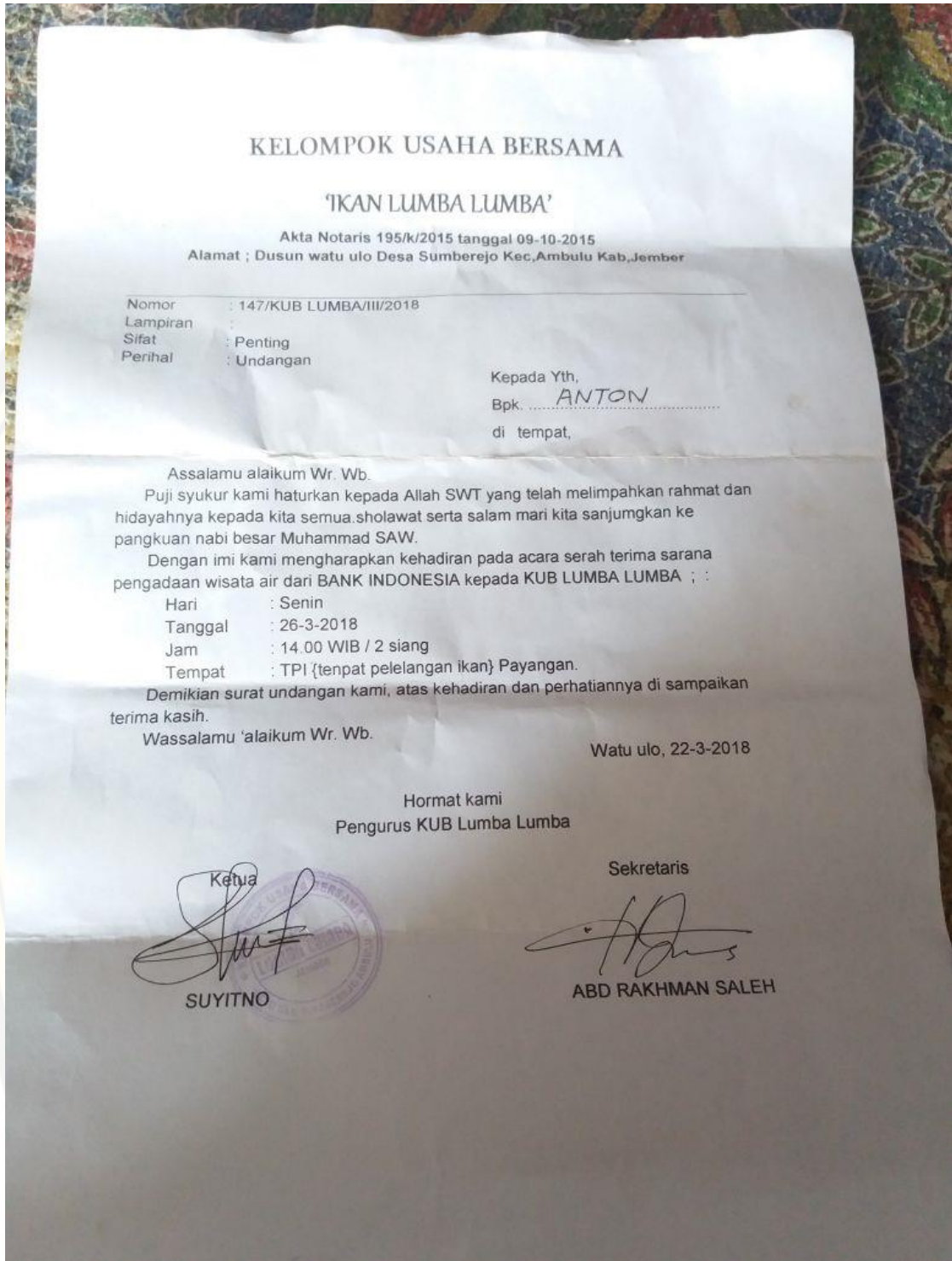
Masyarakat Wisata Watu Tumpeng merupakan masyarakat tradisional yang juga ingin damai dan sejahtera.dengan harapan besar masyarakat adalah bisa diberikan kesempatan untuk urun pemikiran dalam mewujudkan wisata baru yaitu wisata Watu Tumpeng hingga menjadi harapan dimasa mendatang.

### **Penutup**

Dengan memanjatkan rasa syukur atas kebesaran Alloh SWT. Kami berharap ada perubahan yang baik bagi kami masyarakat Wisat Watu Tumpeng pada khususnya dan dan kabupaten jember pada umumnya.



**E.Undangan Rapat Dan Musyawarah Kegiatan Pariwisata Pantai Payangan**





F.Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 39/UN25.3.1/LT/2018  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

4 Januari 2018

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jember

Di  
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 21/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Dhana Febrian Safitri  
NIM : 140910201027  
Fakultas : ISIP  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Andongsari, Krajan Ambulu-Jember  
Judul Penelitian : "Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Komunitas Wisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember"  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Jember  
2. Pemerintah Desa Sumberejo, Ambulu Kab. Jember  
3. Komunitas Wisata Pantai Payangan, Kec. Ambulu  
4. Pengelola Destinasi Wisata Pantai Payangan Kec. Ambulu  
Lama Penelitian : 3 Bulan (10 Januari -30 April 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.




Dr. Susanto, M.Pd.  
NIP. 196306161988021001

- Tembusan Yth
1. Kepala Disbudpar Kab. Jember;
  2. Kepala Desa Sumberejo Ambulu;
  3. Ketua Komunitas Wisata Pantai Payangan Ds Sumberejo;
  4. Pengelola Destinasi Wisata Pantai Payangan;
  5. Dekan FISIP Univ Jember;
  6. Mahasiswa ybs;
  7. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173

G.Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kab. Jember  
2. Camat Ambulu Kab. Jember  
3. Ketua Kelompok Sadar Wisata  
Pantai Payangan Kec. Ambulu  
di -  
J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 072/155/415/2018

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 04 Januari 2018 Nomor : 39/UN25.3.1/LT/2018 perihal Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**


Nama / NIM. : Dhana Febrian Safitri / 140910201027  
Instansi : FISIP / Ilmu Adm. Negara / Universitas Jember  
Alamat : Andongsari, Krajan Ambulu, Jember  
Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :  
"Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Komunitas Wisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember".  
Lokasi : .....  
Waktu Kegiatan : 10 Januari s/d 30 April 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 18-01-2018  
An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Kabid. Kajian Strategis dan Politik

  
**ACHMAD DAVID, S.Sos**  
Penata  
NIP. 19690912 199602 1 001

Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Univ. Jember;  
2. Yang Bersangkutan.